



Kabupaten Sidoarjo



RENCANA STRATEGIS Sekretariat daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Secara umum, RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DINSOSNAKER Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo memuat isu strategis khususnya dalam akuntabilitas, pelayanan humas protokol, dan pemerintahan umum di Kabupaten Sidoarjo. Melalui dokumen RENSTRA ini, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat memperoleh pedoman dalam menentukan arah atau strategi dan sasaran strategi yang ingin di capai selama periode tahun 2016-2021.

Pada akhirnya, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini.

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN.....	5
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.....	9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
2.2 Struktur Organisasi.....	14
2.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	15
2.4 Kinerja Pelayanan.....	16
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	52
Bab 3: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	55
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.....	55
3.2 Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah Terpilih.....	56
3.3 Telaah Renstra K/L & Provinsi	57
3.3.1 Telaah Renstra Sekretariat Negara 2104-2018	57
3.4 Isu-Isu Strategis.....	61
BAB 4: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	63
4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan	63
4.1.1 Tujuan.....	63
4.1.2 Sasaran	64
4.2 Strategi dan Kebijakan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	72
5.1 Matrik Rencana Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	73
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	108
6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

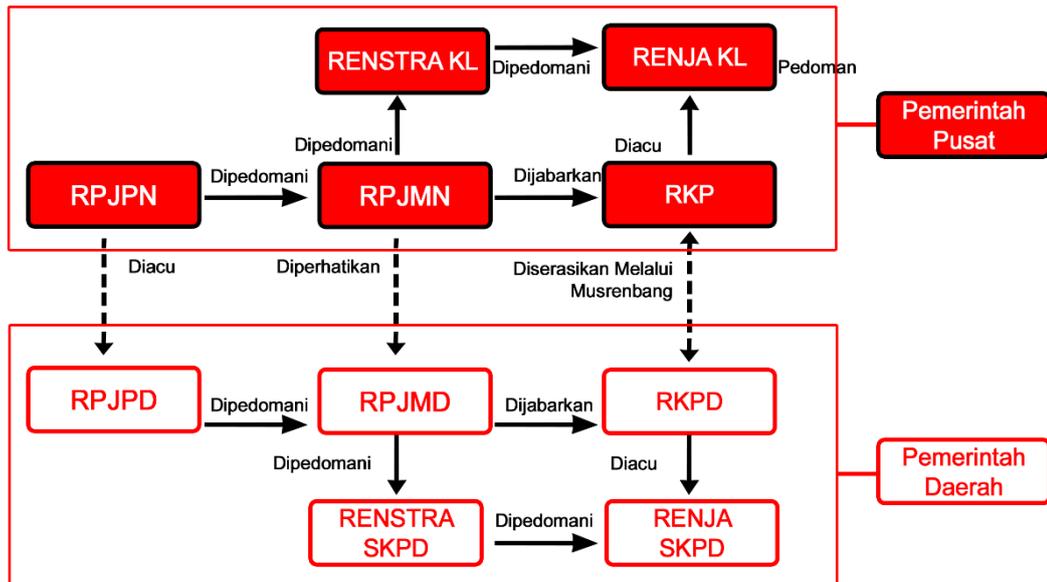
Tabel 1 Tabel Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah	15
Tabel 2 Sarana dan Prasarana Sekretaria Daerah	16
Tabel 3 Rincian Permasalahan Bagian Pertanahan	17
Tabel 4 MOU Sekretariat Daerah	28
Tabel 5 Kerjasama Antar Daerah.....	28
Tabel 6 Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri	28
Tabel 7Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah	29
Tabel 8 Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah / Swasta	32
Tabel 9 Kerjasama Antar Daerah.....	33
Tabel 10 Penerimaan Raskin dari tahun 2010 s.d 2015.....	34
Tabel 11Perkembangan alokasi dana Raskin tahun 2010 s.d2015	35
Tabel 12 Jumlah rumah ibadah yang dibantu	36
Tabel 13 Penyusunan dan Pengiriman LKPJ, LAKIP dan LPPD.	38
Tabel 14 Standar Pelayanan Minimal	42
Tabel 15 Standar Pelayanan (SP).....	43
Tabel 16 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	44
Tabel 17 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	46
Tabel 18 Jumlah produk hukum.....	47
Tabel 19 Jumlah permasalahan hukum	47
Tabel 20 Jumlah sengketa hukum	48
Tabel 21 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	55
Tabel 22 Visi, Misi dan Program Kabupaten Terpilih	57
Tabel 23 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran.....	64
Tabel 24 Identifikasi SWOT	67
Tabel 25 Rumusan SWOT	67
Tabel 26 Tabel Kebijakan Umum.....	69
Tabel 27 Linearitas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, dan kebijakan	71
Tabel 28 Matrik Rencana Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	73

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan Strategis (Renstra) juga merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Permasalahan yang muncul merupakan konsekuensi dari proses pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh kepala daerah. Pada unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan daerah lima tahunan dengan memperhatikan mandate dari RPJMD daerah yang terpilih. Gambar dibawah merupakan hubungan antar dokumen perencanaan di daerah.



Gambar 1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Melalui perencanaan strategis yang baik, instansi pemerintah lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah Sidoarjo atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat Daerah, selanjutnya dapat dijabarkan lagi dalam rencana kerja SKPD Sekretariat Daerah. Dengan kata lain, tidak ada pembangunan, kegiatan atau program yang menyelisihi setiap agenda yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 ini menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- i. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029
 - q. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 -2021
 - r. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - s. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok sehingga seluruh komponen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga sebagai kendali dalam menentukan kebijakan dan program prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan secara baik. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi pembangunan Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan kewenangan.

3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Sekretariat Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
4. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 tersusun sebagaimana berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan OPD

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L terkait dan Renstra PD Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup



BAB II: GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban yaitu untuk membantu bupati dan menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo.

A. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi

B. Sekretariat Daerah disamping bertugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana juga mempunyai fungsi.

Fungsi Sekretariat Daerah antara lain:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Asisten Administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
 - Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
 - Pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumusan

kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan

2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Pemukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan BUMD;
- Perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- Pelayanan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Asisten Administrasi Umum

1. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyiapkan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga.

2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD : Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset; Badan Pelayanan Pajak Daerah; Sekretariat DPRD; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Perumusan kebijakan di bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga;

- Pelayanan administrasi di bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum, protokol dan rumah tangga;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2009, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibagi dalam susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum.
- c. Asisten Tata Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Organisasi;
 2. Bagian Umum;
 3. Bagian Protokol dan Rumah Tangga;



Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Sidoarjo

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjejang aparaturnya, maka kondisi aparaturnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Tabel Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN									JUML
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	
1	SEKRETARIS DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	STAF AHLI	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
3	ASISTEN SETDA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
4	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	2	0	0	0	7	3	0	12
5	BAGIAN KESRA	0	0	1	0	0	0	5	2	0	8
6	BAGIAN HUKUM	0	0	1	0	0	0	11	2	0	14
7	BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA	0	0	4	0	0	0	4	1	0	9
8	BAGIAN PEMBANGUNAN	0	0	3	0	0	1	6	3	0	13
9	BAGIAN PBJ	0	0	5	0	0	5	19	4	1	34
10	BAGIAN ORGANISASI	0	0	3	0	0	1	6	3	0	13
11	BAGIAN UMUM	0	0	11	0	0	1	13	3	0	28
12	BAGIAN PROTOKOL & RT	0	3	13	0	0	2	16	1	0	35
TOTAL KESELURUHAN		0	3	43	0	0	10	88	28	1	173

Selain ketersediaan SDM yang cukup, untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah di upayakan pengadaan prasarana dan sarana sebagai berikut:

Tabel 2 Sarana dan Prasarana Sekretaria Daerah

NO	JENIS KIB	JUMLAH ASET (Rp)	KETERANGAN
1.	KIB A (Tanah)	54.852.000.000,00	Meliputi tanah pendopo, tanah setda, tanah villa tretes, rumah tamu
2.	KIB B (Peralatan dan mesin)	35.812.673.370,86	Meliputi alat besar, alat angkut, alat bengkel dan ukur, alat pertanian / peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio
3.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	22.680.079.816,00	Meliputi gedung kantor Setda, pendopo, rumah tamu, villa tretes, pilar batas desa / kecamatan / daerah, tugu peringatan
4.	KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	1.169.381.030,00	Meliputi jaringan instalasi listrik, air, telepon
5.	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	129.275.850,00	Meliputi bahan perpustakaan, bahan bercorak kesenian
	TOTAL	114.643.410.066,86	

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Bagian Administrasi Pemerintahan

a. Penyelesaian Kasus Pertanahan

Pada tahun 2015 target sengketa/konflik pertanahan yang dimediasi ditetapkan 100%. Jumlah kasus konflik pertanahan yang masuk sebanyak 46 kasus dan 100% telah dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan, jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 27 kasus, jumlah kasus dalam proses mediasi 11 kasus, jumlah kasus dalam proses hukum 8 kasus atau

17,39%. Adapun rincian permasalahan pertanahan pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Permasalahan Bagian Pertanahan

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Balombangendo	Penyelesaian status kepemilikan tanah eks PT. Ratatex di Desa Balombangendo Kecamatan Balombangendo	Proses mediasi	PT. Ratatex dimohon segera memperjelas status tanahnya dengan menghibahkan kepada Pemerintah Daerah, mewakafkan ke ormas, atau menghibahkan kepada pihak lain melalui keputusan RUPS atau dimohon kembali oleh PT. Ratatex.
2.	Balombangendo	Makam Kristen di Desa Balombangendo Kec. Balombangendo antara Sdr. Pdt. Jimmy Rusni Rasyid dengan PT. Puspa Juwita.	Proses mediasi	Sudah ada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Maret 2015 dan dimenangkan oleh PT. Puspa Juwita namun Sdr. Pdt. Jimmy Rusni masih berusaha menempuh jalur mediasi melalui Pemerintah Kabupaten dan mengajukan banding.
3.	Balombangendo	Pengaduan dari H. Soetono AM CS terkait Permasalahan tanah gogol gilir Desa Bakungpringgondani dengan PT. Bumi Pringgondani Permai	Proses Mediasi	Dalam proses mediasi oleh Pemerintah Desa Bakungpringgodani dan Kecamatan Balombangendo
4.	Gedangan	Permasalahan dugaan penyelewengan penggunaan dana deposito Desa Sawotratap untuk pembangunan Kios PKL Desa Sawotratap	Proses hukum	Dalam proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya.
5.	Gedangan	Pengaduan dari Sdr. Johan Syaifuddin terkait pelayanan administrasi	Selesai	Selesai melalui proses mediasi dan kepada pengadu diminta untuk datang kembali ke Kantor Desa Semambung dengan

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
		pertanahan di Desa Semambung		membawa bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut.
6.	Gedangan	Penggelapan hasil sewa TKD di Desa Semambung Kecamatan Gedangan oleh Kepala Desa Semambung	Proses Hukum	Telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya mantan Kepala Desa Semambung Drs. Aryyoto, SE., MM diputus bersalah dan saat ini yang bersangkutan mengajukan upaya hukum lanjutan.
7.	Gedangan	Penjualan tanah cuwilan eks gogol Desa Karangbong oleh Kepala Desa Karangbong Kec. Gedangan dan warga eks gogol Desa Karangbong	Proses hukum	Proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya.
8.	Gedangan	Tumpang tindih kepemilikan tanah antara TKD Tebel Kec. Gedangan di Desa Punggul Kec. Gedangan dengan sertifikat HGB milik PT. Jayaland	Proses mediasi	Dalam proses mediasi di Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
9.	Buduran	Pengaduan dari Sdr. Saberi melalui kuasa hukum DR. M. Shoinudin Umar, SH M.Si & Ass untuk mohon surat keterangan tanah dan foto copy letter C desa serta gambar kretek tanah atas tanah sengketa seluas ± 1.269 m2 di Desa Dukuh Tengah RT 06 RW 02 Kec. Buduran.	Selesai	Permasalahan tersebut telah ditangani oleh Ombudsman RI dan penjelasan Pemerintah Desa Dukuhtengah dapat diterima.
10.	Ketapang - Tanggulangin dan Kesambi - Porong	Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Porong-Gempol dan Jalan	Selesai	Telah difasilitasi dengan hasil : 1. Tanah milik Sdr. Iskandar masuk dalam ROW Jalan Tol Trase Baru dan belum terbayar. BPLS agar segera

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
		Arteri Raya Porong, khususnya untuk pengaduan Sdr. Kastawi atas tanah milik Sdr. Iskandar dan tanah milik Alm. Gasim P. Kasan di Desa Kesambi Kecamatan Porong.		menyelesaikan permasalahan tersebut. 2. Tanah Gasim P Kasan, walaupun terjadi selisih, setelah dilakukan kroscek kembali tidak serta merta dapat dibayar. Karena sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan uangnya sudah diambil oleh pemilik tanah yang sah yang selama ini tidak mengajukan keberatan secara tertulis. 3. Apabila pihak pengadu masih belum menerima dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan berlaku.
11.	Porong	Pengaduan dari Sdr. Jumain Cs. Meminta perlindungan Hukum dan klarifikasi atas harta waris p. poniman/Bu Painten	Selesai	Telah difasilitasi dengan hasil: 1. Permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah mufakat dan telah disepakati Jumain Cs meminta pembagian hak yang sama; 2. Pihak Suwarni akan beritikad baik untuk memberikan prosentase kepada pihak Jumain Cs.
12.	Porong	Sengketa letak /batas sawah gogol gilir	Selesai	Kepala Desa Glagaharum akan melaksanakan musyawarah desa dengan mengundang semua pemilik tanah sawah gogol gilir di blok tersebut beserta anggota BPD dan tokoh masyarakat untuk menetapkan letak tanah sawah masing-masing gogol.
13.	Porong	Pengaduan warga korban lumpur atas nama Sdr. Munif Kelurahan Siring Kec. Porong	Selesai	Telah difasilitasi dengan hasil: 1. Untuk pengaduan Sdr. Munif tidak akan dapat terselesaikan sampai yang bersangkutan sepakat dengan harga serta

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
				<p>prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>2. Pengadu dapat melakukan upaya lain sesuai ketentuan yang berlaku apabila masih keberatan dengan besaran harga yang ditetapkan oleh pemerintah.</p>
14.	Porong	Pengaduan permohonan surat keterangan waris oleh Sdr. Ismail kepada Pemerintah Desa Pesawahan yang dipersulit	Selesai	Surat keterangan waris telah diterbitkan.
15.	Candi	Permasalahan tukar guling TKD Candi oleh PT. Candi Sakti Perkasa	Proses Mediasi	Dalam proses sertifikasi eks TKD Candi dan tanah pengganti TKD di Desa Balongdowo.
16.	Waru	Permasalahan pengaduan Sdr. Arif Chandra atas tanah di Desa Bungurasih Kecamatan Waru yang terkena Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto	Proses Mediasi	<p>Telah difasilitasi dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah yang diadukan sudah masuk dalam daftar konsinyasi, dan ganti rugi sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo; 2. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan menempuh jalur hukum.
17.	Waru	Pengaduan dari pengacara Husein Salim Bahdar, SH kuasa hukum dari Sdr. Abdul Wachid bin Abdul Latif atas sengketa tanah dengan bukti letter C Desa Ngingas No. 88 dan Sertifikat No. 1350 an. Ita Fauziyah dan No. 1686 an. Dewi Aminah	Selesai	<p>Telah diklarifikasi oleh Camat Waru dengan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan dokumen Desa bahwa tanah darat yang terletak di persil 32 a d.l letter C Desa Ngingas No. 889 tertulis atas nama Markayah dengan luas 450 m²; 2. Kondisi eksisting telah didirikan bangunan rumah milik Abdul Wachid bin Abdul Latif; 3. Sertifikat No. 1686 terbit pada tahun 2010 adapun Kepala Desa Ngingas H.

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
				Samian, Spd mulai menjabat sejak Nopember 2013 sehingga tidak mengetahui proses awal sampai penerbitan setifikat tersebut.
18.	Waru	Permasalahan tanah tangkis/pengairan yang masuk dalam SHGB 2364 milik PT. Golden Union Oil dan di atasnya berdiri bangunan warga	Selesai	Telah difasilitasi dengan hasil : 1. Sdr. H. Yunus selaku pemilik tanah SHGB No. 2364 an. Kariatun akan mengajukan pengembalian batas tanah ke Kantor Pertanahan Sidoarjo secara resmi agar mengetahui batas-batas sempadan sungai; 2. Instansi/SKPD terkait yang mempunyai kewenangan atas Sungai Buntung agar melakukan pengelolaan/pemeliharaan / pengawasan dan penertiban terhadap tanah sempadan sungai Buntung dimaksud karena banyak yang sudah ditempati sepihak tanpa prosedur yang sah oleh warga sekitar.
19.	Waru	Permasalahan tukar menukar TKD Berbek dengan PT. SIER pada tahun 1981	Proses Mediasi	Telah difasilitasi dengan hasil : 1. Selisih ukur tanah seluas 2.500 m2 antara Tanah Desa Berbek yang dilepas kepada PT. SIER dengan hasil ukur dari Kantor Pertanahan masih dalam batas kewajaran karena deviasi hasil ukur masih dibawah 10% dari luas tanah; 2. Disarankan kepada Pengadu untuk menempuh jalur hukum.
20.	Waru	Sengketa Kepemilikan Tanah	Selesai	Putusan perdata pengadilan negeri Sidoarjo, Pengadilan

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
		antara Sdr. M. Sa'i dengan PT. Sindo Perkasa Usahatama (Sdr. Henry J. Gunawan) dan PT. Sunindo Prima Land.		Tinggi dan MA pada tahun 2012 telah dimenangkan oleh PT. Sindo Perkasa dan PT. Sunindo Prima Land. Terhadap dakwaan pidana terhadap Sdr. M. Sa'i telah diputus pada tahun 2015 oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo batal demi hukum.
21.	Sedati	Alih Fungsi TKD Sedatigede untuk makam.	Selesai	Pembangunan makam umum oleh Pemerintah Desa tetap akan dilakukan karena telah tertuang dalam APBDes dan RPJMDes.
22.	Sedati	Permasalahan pembangunan gardu induk dan saluran kabel tegangan tinggi yang mengenai TKD Betro	Proses Mediasi	Telah difasilitasi dengan hasil : <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. PLN harus menyelesaikan adminitrasi ruislagh TKD sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Akan dilakukan sosialisasi kepada Pempdes, BPD maupun tokoh masyarakat bahwa ruislagh TKD Betro akan diproses sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku; 3. IMB akan diterbitkan parsial.
23.	Sedati	Sengketa tanah di Desa Kalanganyar antara Pemerintah Desa Kureksari Kec. Waru dengan Sdr. Marngali.	Proses hukum	Telah selesai dimediasi dan Pemerintah Desa Kureksari akan menempuh jalur hukum.
24.	Wonoayu	Penjualan tanah cuilan Candinegoro Kec. Wonoayu	Selesai	Penjualan tersebut telah dibatalkan.
25.	Wonoayu	Pengaduan an. Sdr. Suhari terkait pelayanan kurang baik dari Pemerintah Desa Karangpuri berkenaan dengan sengketa tanah yang terletak di Dusun Sampuri RT 01 RW	Selesai	Telah selesai melalui mediasi oleh Kecamatan Wonoayu dan pengaduan tersebut juga telah ditangani oleh Komisi Pelayanan Publik.

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
		05 antara Suhari Cs dengan Masamah Cs.		
26.	Wonoayu	Pengaduan Saudara Khusnul Arifin terkait pengurukan Sawah Gogol miliknya di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu oleh PT. Surya Multi Cemerlang seluas ± 1,5 Ha.	Proses Mediasi	Telah difasilitasi dengan hasil : (1) PT. SMC dimohon segera menyelesaikan permasalahan tanah sawah dengan sdr Khusnul (dengan jual beli atau tukar menukar/geser); (2) Jika tidak ada kesepakatan, para pihak (PT SMC dan Sdr. Khusnul disarankan menempuh jalur hukum agar segera mendapat kepastian hukum.
27.	Sidoarjo	Tanah Cuilan Kelurahan Cemengkalang yang telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Selesai	Telah difasilitasi dengan hasil : 1. Berdasarkan aspek yuridis pembuktian hukum atas tanah maka tanah cuilan dimaksud merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten; 2. Apabila warga pegogol masih tetap mengklaim kepemilikan terhadap tanah cuilan tersebut maka disarankan untuk menempuh jalur hukum.
28.	Sidoarjo	Rencana Kerjasama Pemanfaatan TKD Sarirogo untuk Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa	Proses hukum	Dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
29.	Sidoarjo	Penyelesaian Tanah Pengganti Aset Pemkab Sidoarjo (Eks TKD Kelurahan Sidoklumpuk) di Desa Klantingsari Hasil Tukar Menukar dengan PT. Avilla Prima.	Proses mediasi	Dalam proses mediasi penyelesaian tanah pengganti.
30.	Sidoarjo	Pengaduan terkait permohonan surat	Selesai	Telah selesai melalui mediasi.

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
		keterangan riwayat tanah an. Kasdu yang tidak ditanggapi oleh Kelurahan Gebang		
31.	Taman	Sengketa tanah KUD Tani Manunggal Desa Kletek antara Pemerintah Desa Kletek Kecamatan Taman dan Pengurus KUD Tani Manunggal Desa Kletek	Selesai	Kasus selesai melalui proses hukum dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Juli 2015 dengan Nomor Putusan : 31/Pdt.G/2015/PN.Sda dan dimenangkan oleh Pemerintah Desa Kletek.
32.	Taman	Permasalahan pemanfaatan TKD Trosobo dan permasalahan pembangunan Ruko di Desa Trosobo Kec. Taman	Selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan; - Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat agar dilakukan pemantauan/ pembinaan dan pengawasan oleh Camat Taman.
33.	Taman	Permasalahan TKD wage yang terletak di Blok Grumbul Desa Wage.	Selesai	Telah diklarifikasi oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo menjawab pengaduan Forum Peduli Wage (FPW) yang menyampaikan bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh FPW adalah tanah milik PT yang diperoleh dari tanah milik perorangan.
34.	Tanggulangin	Permasalahan penjualan Tanah Kas Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin di Blok Lampong seluas ± 2 Ha yang dibeli oleh Sdr. Rudy N.	Selesai	Telah difasilitasi dengan hasil : <ol style="list-style-type: none"> 1. TKD Ketegan tersebut harus tetap menjadi milik Pemerintah Desa; 2. Pemdes Ketegan agar tidak memberi pelayanan administrasi apapun terhadap obyek tanah dimaksud.
35.	Tanggulangin	Pengaduan warga korban lumpur atas nama Sdri. Sri Wiludjeng Desa Kedungbendo	Selesai	Telah difasilitasi dengan hasil : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait pengaduan Sdri. Sri Wiludjeng sudah masuk dalam planning lanjutan dari PT. MLJ, hanya menunggu

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
				approval dari Pemerintah, selanjutnya akan dicatat terkait pengaduan ini sebagai bahan PT. MLJ melakukan percepatan; 2. Masih ada 114 rumah (kasus serupa) yang belum terakomodir akan ditindaklanjuti oleh PT. MLJ secepatnya dan diharapkan dapat terealisasi tahun 2015; 3. Pengadu sudah menerima penjelasan dari PT. MLJ maupun dari BPLS dan bersedia menunggu dan bersabar atas tindak lanjut penyelesaiannya.
36.	Tanggulangin	Pengaduan Sdr. Mokhammad Marzuki, SH terkait praktek pungutan untuk mengurus surat kematian, surat keterangan waris dan surat riwayat tanah di lingkungan Desa Ngaban	Selesai	Telah dimediasi oleh Kecamatan dan pengadu sudah tidak mempersoalkan kembali pengaduan dimaksud.
37.	Tanggulangin	Fasilitasi pengaduan tanah desa Gempolsari yang dilepas/dibayar BPLS kepada perorangan.	Proses hukum	Dalam proses hukum.
38.	Krembung	Sengketa tanah antara H. Sholikin dengan Pemerintah Desa Krembung.	Proses hukum	Telah melalui sengketa di Pengadilan Negeri Sidoarjo dimenangkan oleh Pemerintah Desa Krembung, H. Sholikin mengajukan banding di Pengadilan Tinggi.
39.	Sukodono	Pengaduan Sdr. H. Sidik Desa Masangankulon Kecamatan Sukodono yang mengklaim	Selesai	Kasus selesai melalui proses hukum dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2013 dengan Nomor Putusan : 35/Pdt.G/2013/PN.Sda yang

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
		kepemilikan tanah SDN Masangankulon Kec. Sukodono		yang dimenangkan Pemerintah kabupaten Sidoarjo dan dilanjutkan dengan proses mediasi dengan hasil : 1. Kegiatan belajar mengajar tidak boleh terganggu, jika ada yang mempermasalahkan tukar guling lahan sekolah tidak boleh melakukan penutupan sekolah secara sepihak; 2. H. Muntono dkk., berjanji tidak akan menutup sekolah lagi dan siap berproses ke Pengadilan.
40.	Sukodono	Penjualan tanah Hansip pedukuhan Bangsri antara 350 - 400 m ² kepada Bu Eri.	Selesai	Penjualan tersebut telah dibatalkan.
41.	Prambon	Sengketa tanah milik Sdr. Hartono dengan PT. Bersatu Sukses Sejahtera di Desa Bendotretek.	Proses hukum	Dalam proses hukum.
42.	Prambon	Permohonan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan gogol gilir menjadi gogol tetap Desa Bendotretek oleh petani gogol gilir Desa Bendotretek yang dipersulit oleh Kepala Desa Bendotretek.	Selesai	Selesai melalui proses mediasi.
43.	Prambon	Pengaduan dari warga Watutulis terkait kinerja Kepala Desa dan TKD Watutulis untuk kepentingan bisnis.	Selesai	Telah melalui proses mediasi dan klarifikasi oleh Pemerintah Desa Watutulis.

NO	KECAMATAN	KASUS TERDAFTAR	TINGKAT PENYELESAIAN	KETERANGAN
44.	Prambon	Pengaduan warga perumahan Simogirang terkait permohonan perluasan lahan makam desa untuk warga perumahan.	Selesai	Selesai melalui proses mediasi.
45.	Tarik	Pengaduan dari NK Law Office selaku kuasa hukum dari Warsih dkk terkait tindakan pengurukan tanah miliknya dan permintaan pengembalian surat-surat tanah miliknya oleh Pemerintah Desa Gampingrowo.	Proses mediasi	Proses Mediasi
46.	Candi	Permasalahan tanah gogol gilir Wedoroklurak antara Pemerintah Desa Wedoroklurak dengan PT. Bintang Karyasama	Selesai	Permasalahan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dimenangkan oleh Pemerintah Desa Wedoroklurak.

2.3.2 Bagian Kerjasama

a. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan pihak lain

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik dalam rangka peningkatan/pengembangan manajemen tata kelola pemerintahan dan upaya peningkatan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang dituangkan dalam bentuk MOU atau kesepakatan bersama, MOU yang masih berlaku dan berjalan sampai tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 MOU Sekretariat Daerah

No	Jenis MOU	Jumlah
1	MOU dengan lembaga pemerintah	32 kerjasama
2	MOU dengan Daerah Lain	4 Kerjasama
3	MOU dengan Fihak Luar Negeri	4 Kerjasama
4	MOU dengan lembaga non pemerintah	25 kerjasama
5	MOU dengan universitas	23 kerjasama

Sumber: Bagian Kerjasama Setda

b. Kerjasama Antar Daerah Yang Masih Berlaku sampai dengan tahun 2015

Tabel 5 Kerjasama Antar Daerah

NO	KERJASAMA	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1	Pemerintah Kabupaten Konawe (Propinsi Sulawesi Tengah)	21 Maret 2012	nomor : 188/21/404.1 .1.2/2012	Kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi
2	Pemerintah Kota Pasuruan (Propinsi Jawa Timur)	30 Januari 2014	nomor : 188/03/404.1 .1.2/2014	Pembangunan daerah dan pelayanan public

Sumber: Bagian Kerjasama Setda

c. Kerjasama Yang Dijalin Dengan Pihak Luar Negeri

Tabel 6 Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

NO	KERJASAMA	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Jinan	15 Januari 2015		Pembentukan hubungan persahabatan antara pemerintah

				kabupaten sidoarjo, propinsi jawa timur, republik indonesia dengan pemerintah rakyat kota jinan, propinsi shandong, republik rakyat tiongkok
--	--	--	--	--

Sumber: Bagian Kerjasama Setda

d. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Selama Tahun 2015

Tabel 7 Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah

NO	KERJASAMA	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1	- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Pengadilan Agama Sidoarjo	20-Apr-15	188/11/404.1.1.2/ 2015 W.13.A16/1914/ HK.05/IV/2015	Kerjasama Sosialisasi, Fasilitasi Relas Panggilan Sidang dan pengumuman lain di Wilayah Kabupaten Sidoarjo melalui papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2	- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	13-May-15	188/13/404.1.1.2./ 2015 KEP.1625/SJ/ V/ 2015	Hibah Tanah Di Desa Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo
3	- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Kementerian Ketenagakerjaan	13-May-15	188/14/404.1.1.2./2015 BA.416/SJ/V/2015	Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah Hak Pakai No.P.5 & P.6 di Desa Janti

	Republik Indonesia			
4	- BPJS – Kesehatan - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	15-Jun-15	685/KTR/VII-09/2015 188/16/404.1.1.2/2015	Dukungan penyelenggaraan program Kesehatan Nasional
5	- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Direktur BPJS Ketenagakerjaan	11-Sep-15	188/21/404/1/1.2/2015	Kerjasama penyediaan rumah susun sederhana sewabagi pekerja/buruh di Kabupaten Sidoarjo

1. Kerjasama dengan Universitas

NO	KERJASAMA	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2-Mar-15	188/08/404.1.1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)		08/UN.38/DN/2015	Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
2	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	16-Apr-15	188/10/404.1.1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taruna Surabaya		154/4.027.0001/IV/2015	Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
3	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	30-Apr-15	188/12/404.1.1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)		18/MoU/ITS/2015	Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

4	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	16-Jun-15	188/17/404.1.1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
	Institut Agama Islam Al Khoziny		174/A.59/4.79/VI/2015	Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
5	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	30-Jun-15	188/18/404.1.1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya		MoU.06/ITATS/VI/2015	Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
6	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2-Jul-15	188/19/404.1.1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
	Universitas Maarif Hasyim Latif		120/B-01/UMAHA/VII/2015	Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
7	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	1-Sep-15	188/20/404/1/1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
	Rektor Universitas Negeri Malang			Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
8	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	18-Sep-15	188/22/404/1/1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
	Rektor Universitas Airlangga			Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
9	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	30-Sep-15	188/24/404/1/1.2/2015	Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

	Rektor UNTAG		730/K/UM/IX/2015	Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
--	--------------	--	------------------	----------------------------------

2. Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah / Swasta

Tabel 8 Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah / Swasta

NO	KERJASAMA	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	14-Jan-15	188/01/404.1.1.2/2015	Hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan jalan
	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk - Cabang Sidoarjo		01/EKS.TS/JCI/L&LDS-TS/15	pendamping (Frontage Road) Waru - Buduran
2	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	14-Jan-15	188/02/404.1.1.2/2015	Hibah bangunan untuk pembangunan jalan pendamping
	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk - Cabang Gedangan		02/EKS.TS/JCI/L&LDS-TS/15	(Frontage Road) Waru - Buduran
3	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	14-Jan-15	188/03/404.1.1.2/2015	Hibah Bangunan Jalan untuk pembangunan jalan
	PT. Panggung Electric Citrabuana		F136/PEC/I/2015	pendamping (Frontage Road) Waru-Buduran
4	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	14-Jan-15	188/04/404.1.1.2/2015	Hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan jalan

	PT. Trias Sentosa		001/SKT/PTTS/2015	pendamping (Frontage Road) Waru - Buduran
5	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	14-Jan-15	188/05/404.1.1.2/2015	Pembangunan Jalan Akses menuju lokasi
	PT. Surabaya Lingkar Mas		02/I/SLM/2015	PT. Surabaya Lingkar Mas (RAMP 115)
6	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	29-May-15	188/15/404.1.1.2./2015	Hibah Bangunan Monumen Jayandaru
	PT. Sekar Laut, Tbk - Sidoarjo		SKL/CSR/V/2015/001	Jl. A Yani - Sidoarjo

3. Kerjasama antar daerah

Tabel 9 Kerjasama Antar Daerah

NO	KERJASAMA	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	10-Aug-15	595/Nakertrans/562/VIII/2015	Kerjasama penyelenggaraan program Transmigrasi di
	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		188/19.A/404.1.1.2/2015	lokasi UPT Ayumolyo Kec. Pulubalas Kab. Gorontalo
2	Pemerintah Kabupaten Lahat	29-Sep-15	140/200/PK/404.012/2015	Penyelenggaraan program Transmigrasi Desa Kebon
	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		188/23/404/1/1.2/2015	Agung Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat Prop. Sumsel
3	Pemerintah Propinsi Jawa Timur	2-Jan-15	120.1/27/012/2015	Peningkatan program Puskesmas

	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		188/01.A/404.1.1.2/2015	
4	Pemerintah Propinsi Jawa Timur	15-Jan-15	120.1/77/012/2015	Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		188/06/404.1.1.2/2015	
5	Pemerintah Propinsi Jawa Timur	02-Peb-15	120.1/130/012/2015	Kerjasama Pembangunan Daerah
	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		188/07/404.1.1.2/2015	

2.3.3 Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan

a. Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin

Untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin maka pemerintah pusat bersama dengan pemerintah kabupaten Sidoarjo menyalurkan bantuan beras bagi masyarakat miskin atau yang lebih dikenal dengan program Raskin. Jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

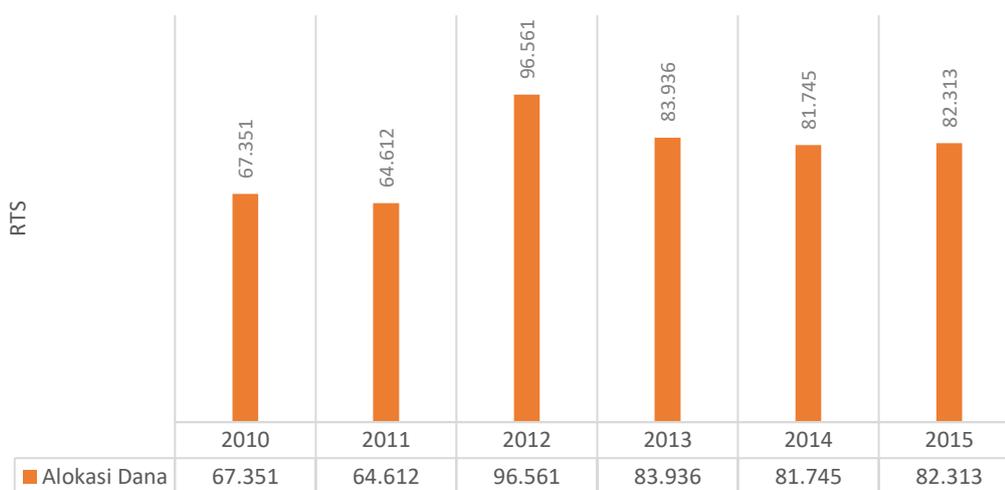
Tabel 10 Penerimaan Raskin dari tahun 2010 s.d 2015

Sumber Dana	2010 (RTS)	2011 (RTS)	2012 (RTS)	2013 (RTS)	2014 (RTS)	2015 (RTS)
APBN	61.971	61.971	93.243	78.103	78.103	78.103
APBD	5.380	2.641	3.318	5.833	3.642	4.210
Jumlah	67.351	64.612	96.561	83.936	81.745	82.313

Sumber: Bagian Adm Kesra dan Kesmasayarakatan

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima raskin (APBN-APBD) tahun 2015 dibanding tahun 2014 sebesar 568 RTS atau 0,69 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sebesar 146.118 RTS, maka capaian kinerja tahun 2015 hanya mencapai sebesar 56,33%. Hal ini disebabkan untuk Raskin APBN jumlah RTS sebanyak 78.103 sudah ditentukan oleh TNP2K pusat sedang Raskin APBD sangat tergantung pada kemampuan daerah. Apabila digambarkan dalam grafik, perkembangannya tampak seperti berikut:

Gambar 3 Penerima Raskin



Sumber: Bagian Adm Kesra dan Kemasyarakatan

Alokasi dana yang disediakan untuk program tersebut berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Sidoarjo. Untuk raskin yang berasal dari dana APBD pendistribusiannya secara teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedangkan untuk raskin yang berasal dari dana APBN pendistribusiannya secara teknis menjadi tanggungjawab BULOG. Perkembangan alokasi dana raskin sebagai berikut:

Tabel 11 Perkembangan alokasi dana Raskin tahun 2010 s.d.2015

Tahun	Sumber Dana (Rp)		Jumlah (Rp)
	APBN	APBD	
2010	48.917.428.560	3.288.706.000	52.206.134.560

2011	19.334.952.000	1.729.855.000	21.064.807.000
2012	26.853.984.000	3.023.487.350	29.877.471.350
2013	28.117.080.000	5.238.034.000	33.355.114.000
2014	22.493.664.000	3.727.250.000	26.220.914.000
2015	26.242.608.000	4.737.100.000	30.979.708.000

Sumber: Bagian Adm Kesra dan Kemasyarakatan

Dibanding alokasi dana tahun 2014, pada tahun 2015 ada peningkatan alokasi dana raskin sebesar Rp4.758.794.000,00 atau 19%. Diharapkan bantuan bagi masyarakat miskin dapat terus dilakukan sehingga dapat meringankan beban hidup bagi mereka.

b. Jumlah rumah ibadah yang dibantu

Untuk memelihara kerukunan umat beragama oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo disiapkan bantuan bagi rumah ibadah. Bantuan tersebut berupa bantuan dana bagi kegiatan peribadatan baik membangun sarana maupun kegiatan ibadah.

Tabel 12 Jumlah rumah ibadah yang dibantu

<i>Jumlah Rumah Ibadah Yang Dibantu</i>						
<i>Rumah Ibadah</i>	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
<i>Masjid</i>	38	93	111	101	123	57
<i>Mushola</i>	71	193	166	191	262	143
<i>Pura</i>	0	1	0	0	0	0
<i>Jumlah</i>	109	286	277	292	385	200

Sumber: Bagian Adm Kesra dan Kesmasayakatan

Jumlah yang dibantu setiap tahunnya berfluktuasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan cara mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kabupaten. Alokasi dana untuk bantuan rumah ibadah tahun 2015 sebesar Rp2.495.000.000,00. Pada masa yang akan datang bantuan sosial keagamaan ini masih perlu diteruskan agar kehidupan beragama dapat lebih semakin baik dan meningkat melalui perancangan

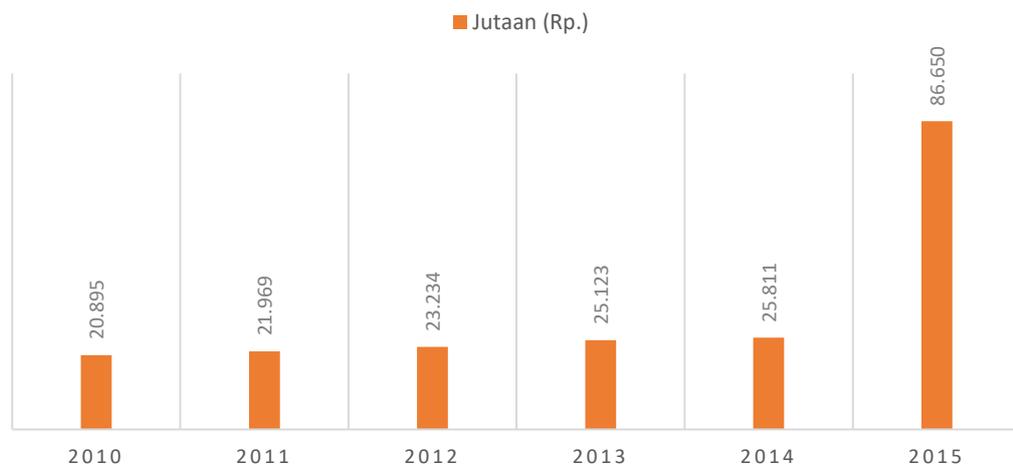
penganggaran secara tepat sehingga keperluan rumah ibadah bagi masyarakat dapat didukung secara optimal.

2.3.4 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a. Jumlah Badan Kredit Desa

Untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan maka perlu dikembangkan Badan Kredit Desa (BKD) yang telah terbentuk sebelumnya. Lembaga berasal dari Bank desa dan Lumbung desa. BKD didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat desa melalui rembug desa. BKD merupakan badan usaha milik desa yang merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan desa. BKD ini dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Jumlah Badan Kredit Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sebanyak 96 BKD, semua Badan Kredit Desa yang ada masih aktif. Perkembangan kekayaan BKD selama lima tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 4 Kekayaan BKD

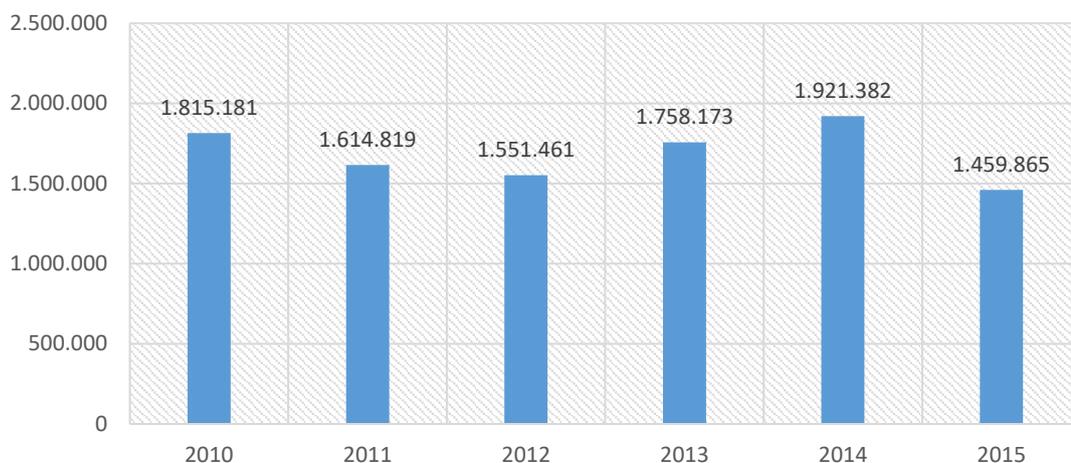


Sumber: Bagian Adm Perekonomian & SDA

Dari sisi kekayaan dibanding tahun 2014, pada tahun 2015 kekayaan BKD mengalami peningkatan sebesar Rp60.839.524.000,00 atau 235,71% yaitu dari kekayaan tahun 2014 yang sebesar Rp 25.811.176.000,00 menjadi sebesar Rp86.650.700.000,00 di tahun 2015. Sedangkan dari sisi laba/keuntungan BKD juga mengalami penurunan sebesar Rp.461.517.000,00 atau 24,02% dari laba tahun 2014 yang sebesar Rp.1.921.382.000,00, menjadi sebesar Rp.1.459.865.000,00 di

tahun 2015. Perkembangan laba/keuntungan BKD selama lima tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 5 Laba / Keuntungan BKD



Sumber: Bagian Adm perekonomian & SDA

Lembaga ini cukup dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu diperkuat kelembagaannya dan melakukan penagihan tunggakan lebih intensif, sehingga lembaga ini dapat mencakup dan melayani masyarakat yang lebih banyak lagi.

2.3.5 Bagian Administrasi Pembangunan

a. Penyusunan dan Pengiriman LKPJ, LAKIP dan LPPD.

Penyusunan LKPJ, LAKIP dan LPPD dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan dan Pengiriman pelaporan kepada Instansi yang terkait dan berwenang selama lima tahun telah disampaikan secara tepat waktu yaitu tidak melebihi 3 bulan dari berakhirnya tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 13 Penyusunan dan Pengiriman LKPJ, LAKIP dan LPPD.

No.	Jenis Pelaporan	Pengiriman Tahun 2011	Pengiriman Tahun 2012	Pengiriman Tahun 2013	Pengiriman Tahun 2014	Pengiriman Tahun 2015	Dikirim Ke
1	Penyelesaian penyusunan dan	Maret 2012	Maret 2013	Maret 2014	Maret 2015	Maret 2016	DPRD

	pengiriman LKPJ						
2	Penyelesaian penyusunan dan pengiriman LAKIP	Maret 2012	Maret 2013	Maret 2014	Maret 2015	Maret 2016	Menteri PAN dan RB
3	Penyelesaian penyusunan dan pengiriman LPPD	Maret 2012	Maret 2013	Maret 2014	Maret 2015	Maret 2016	Menteri Dalam Negeri

Sumber Data : Bagian Adm Pembangunan Setda

Penyusunan dan pengiriman laporan akan tetap dipertahankan untuk selalu tepat waktu dan substansi isi pelaporan akan dilakukan optimalisasi penyempurnaan dan perbaikan. Hasil evaluasi LAKIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 dari Kementerian PAN RB memperoleh kategori B (baik). Sedangkan pembahasan LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 menghasilkan DPRD Kabupaten Sidoarjo menerima LKPJ dari Bupati Sidoarjo dengan beberapa rekomendasi yang akan ditindak lanjuti di Tahun 2016. Dan LPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 memperoleh nilai 3,3579 dengan status kinerja ST (sangat tinggi).

2.3.6 Bagian Telekomunikasi dan Informatika

a. Layanan Barang dan Jasa secara Elektronik

Jumlah layanan Elektronik procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selama tahun 2015 sebanyak 500 paket, capaian tahun ini meningkat 57 paket dibanding tahun 2014 sebanyak 443 paket. Layanan non procurement sudah ditiadakan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan korupsi dimana pelaksanaan pengadaan barang jasa harus transparan sehingga harus menggunakan Elektronik Procurement.

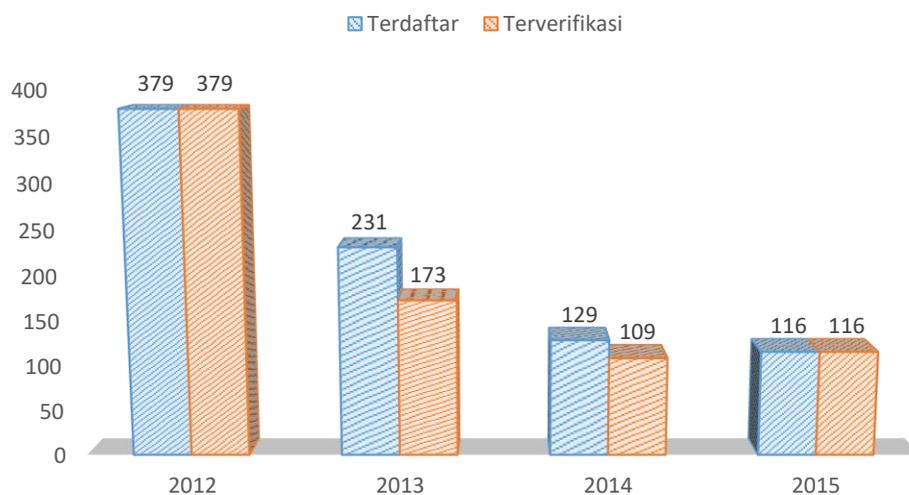
Jumlah penyedia yang mendaftar melalui LPSE Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sebanyak 116 penyedia, dan jumlah penyedia yang sudah

diverifikasi sebanyak 116penyediajumlah ini turun bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebanyak 129 penyedia. Hal ini disebabkan:

- 1 Aplikasi SPSE sudah teragregasi secara nasional sehingga penyedia dapat mendaftar di LPSE manapun diseluruh Indonesia.
- 2 Penyedia cukup mendaftar 1 (satu) kali untuk mendapatkan user id yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang diseluruh LPSE.
- 3 Sudah banyak penyedia yang terdaftar di LPSE sehingga jumlah penyedia yang belum terdaftar semakin berkurang.

Perkembangan jumlah penyedia dapat digambarkan sebagaiberikut:

Gambar 6 Jumlah Penyedia Terdaftar dan Terverifikasi s.d Tahun 2015



Sumber: Bagian Telematika

Dari grafik diatas dapat dilihat semakin menurunnya jumlah penyedia yang terdaftar dan terverifikasi di LPSE Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2012 s.d 2015. Pada tahun 2012 jumlah penyedia yang terdaftar dan terverifikasi sebanyak 379 penyedia. Tahun 2013 penyedia yang terdaftar 231 dan yang terverifikasi 173 penyedia. Tahun 2014 penyedia yang terdaftar turun menjadi 129 dan terverifikasi sebanyak 109 penyedia.Sedangkan pada Tahun 2015 penyedia yang terdaftar turun menjadi 116 dan terverifikasi sebanyak 116 penyedia.

b. Infrastruktur Jaringan Komputer

Kondisi infrastruktur dan penggunaan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor dan Ruang Dinas Bupati) telah memperoleh layanan internet yang disediakan melalui Bagian Telekomunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Sidoarjo. Langganan internet dipusatkan di Bagian Telematika dan didistribusikan ke SKPD melalui jaringan komputer. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur jaringan komputer yaitu bandwidth yang tersedia belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan internet pada masing-masing SKPD yang semakin meningkat.

c. Jumlah kegiatan pelatihan / sosialisasi dan jumlah pesertanya

Pada tahun 2015 Kegiatan pelatihan /sosialisasi dalam bidang komunikasi dan informasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pelatihan TIK (pengelolaan website) dengan jumlah peserta 57 orang, dan pelatihan SOP dibidang TIK dengan jumlah peserta 6 orang. Peningkatan pemahaman terhadap Teknologi Informasi sangat diperlukan mengingat perkembangan informasi yang ada.

2.3.7 Bagian Organisasi

a. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dimiliki

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah telah menetapkan 15 SPM untuk menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

SPM pada penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan

kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kelembagaan dan personil. Dalam melaksanakan SPM diperlukan pemetaan kondisi awal SPM pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya. Tujuan penyusunan rencana pencapaian SPM adalah menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan dasar, yang menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil, transparan, dan dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 14 Standar Pelayanan Minimal

NO.	SPM YANG SUDAH DILAKSANAKAN / DITINDAKLANJUTI	KETERANGAN
1	2	3
1.	SPM Bidang Perumahan Rakyat	15 bidang tersebut telah dilaksanakan dan dilaporkan capaiannya
2.	SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	
3.	SPM Bidang Sosial	
4.	SPM Bidang Kesehatan	
5.	SPM bidang Pemberdayaan Perempuan	
6.	SPM Bidang Lingkungan Hidup	
7.	SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
8.	SPM Bidang Pendidikan Dasar	
9.	SPM Bidang Ketenagakerjaan	
10.	SPM Bidang Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

NO.	SPM YANG SUDAH DILAKSANAKAN / DITINDAKLANJUTI	KETERANGAN
11.	SPM Bidang Ketahanan Pangan	
12.	SPM Bidang Kesenian	
13.	SPM Bidang Komunikasi Dan Informatika	
14.	SPM Bidang Perhubungan	
15.	SPM Bidang Penanaman Modal	

Sumber: Bagian Organisasi Setda

2. Standar Pelayanan (SP)

Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pengganti PERMENPAN dan RB Nomor 36 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Diperlukan adanya standar pelayanan oleh setiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan.

Tersusunnya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. Sampai dengan tahun 2015 lembaga pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo yang telah menyusun Standar Pelayanan sebanyak 130 unit atau 91,55% dari lembaga pelayanan publik yang ada sebanyak 142 unit. Dibandingkan tahun 2014 sebanyak 109 unit, terdapat peningkatan sebanyak 21 unit. Rincian lembaga yang Menyusun Standar Pelayanan (SP) sebagai berikut:

Tabel 15 Standar Pelayanan (SP)

NO	Unit/Lembaga	JUMLAH	Sudah Menyusun SP	Belum menyusun SP
----	--------------	--------	-------------------------	----------------------

1.	Dinas / Badan / Kantor / Perusahaan Daerah	22 Unit	22 Unit	- Unit
2.	UPTD	71 Unit	59 Unit	12 Unit
3.	Kecamatan	18 Unit	18 Unit	- Unit
4.	Kelurahan	31 Unit	31 Unit	- Unit
Jumlah		142 Unit	130 Unit	12 Unit

Sumber data : Bagian Organisasi Setda

Prosentase Unit/Lembaga yang sudah menyusun SP sekitar 91,55%, sehingga ada sekitar 8,45% yang belum menyusun. Dari tabel tersebut masih terdapat 12 unit lembaga yang belum membuat Standar Pelayanan (SP), karena persepsi UPTD jenis pelayanan yang diberikan sudah melekat pada SKPD induknya, sehingga UPTD belum membuat Standar Pelayanan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2015, dilakukan pengukuran pelayanan bidang pemerintahan, kesehatan, perijinan, pelayanan publik dengan nilai rata-rata 78,09 atau kategori B (baik) meningkat dibandingkan tahun 2014 dengan nilai rata-rata 77,75. Rincian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI		MUTU	
		IKM		PELAYANAN	
1	2	3		4	
1	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	83,91	(A)	Sangat Baik	
2	Badan Lingkungan Hidup	72,5	(B)	Baik	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,75	(B)	Baik	
4	RSUD	77,69	(B)	Baik	
5	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	73,99	(B)	Baik	
6	Dinas Pasar	68,85	(B)	Baik	
7	Kantor Perpustakaan dan Arsip	81,37	(A)	Sangat Baik	
8	Kecamatan Gedangan	84,62	(A)	Sangat Baik	
9	Kecamatan Sukodono	79,70	(B)	Baik	

10	Kecamatan Prambon	78,27	(B)	Baik
11	Kecamatan Tulangan	78,73	(B)	Baik
12	Kecamatan Krian	78,71	(B)	Baik
13	Kecamatan Tarik	87,55	(A)	Sangat Baik
14	Kecamatan Sidoarjo	81,46	(A)	Sangat Baik
15	Kecamatan Porong	76,62	(B)	Baik
16	Kecamatan Balongbendo	85,44	(A)	Sangat Baik
17	Kelurahan Juwetkenongo	73,15	(B)	Baik
18	Kelurahan Krian	77,17	(B)	Baik
19	Kelurahan Magersari	76,01	(B)	Baik
20	Kelurahan Taman	73,15	(B)	Baik
21	Puskesmas Sidoarjo	71,00	(B)	Baik
22	Puskesmas Porong	80,25	(B)	Baik
23	Puskesmas Krembung	76,50	(B)	Baik
24	Puskesmas Sekardangan	78,12	(B)	Baik
25	Puskesmas Tulangan	78,30	(B)	Baik
26	Puskesmas Trosobo	79,33	(B)	Baik
27	Puskesmas Balongbendo	76,76	(B)	Baik
28	Puskesmas Buduran	80,41	(B)	Baik
29	Puskesmas Sukodono	88,49	(A)	Sangat Baik
30	Puskesmas Urangagung	80,08	(B)	Baik
31	Puskesmas Barengkrajan	81,06	(B)	Baik
32	Puskesmas Taman	77,39	(B)	Baik
33	Puskesmas Tanggulangin	78,64	(B)	Baik
34	Puskesmas Sedati	66,50	(B)	Baik
35	Puskesmas Tarik	75,00	(B)	Baik
36	Puskesmas Prambon	80,15	(B)	Baik
37	Puskesmas Waru	65,75	(B)	Baik
38	Puskesmas Gedangan	68,75	(B)	Baik
39	Puskesmas Kedungsolo	80,36	(B)	Baik
40	Puskesmas Kepadangan	77,23	(B)	Baik
41	Puskesmas Medaeng	68,82	(B)	Baik
	Jumlah =	468,55		
	Jumlah rata-rata =	78,09	B	(Baik)

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

2.3.8 Bagian Hukum

a. Jumlah produk hukum yang ditetapkan

Untuk mengukur efektivitas jalannya pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai sejauh mana kelengkapan peraturan perundangan sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama tahun 2010 s.d 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Jumlah produk hukum yang ditetapkan

NO	Produk Hukum	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Peraturan Daerah	9	21	18	14	10	11
2	Peraturan Bupati	40	64	64	62	62	64
3	Keputusan Bupati	1.805	1.004	1.141	1.392	1.545	1268

Sumber data : Bagian Hukum

Jumlah Perda yang diusulkan tahun 2015 sebanyak 27 Perda namun yang disetujui/ditetapkan 11 Perda, sisa 16 Perda yang masih pembahasan, yaitu 11 Perda masih dibahas di DPRD Kabupaten Sidoarjo, 3 Perda dimasukkan lagi ke Prolegda Tahun 2016 dan 2 Perda lagi dibatalkan. Dari Jumlah produk hukum yang tersusun tersebut tidak dapat dibandingkan pada setiap tahunnya namun disesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 7 Perkembangan Penetapan Perda



Sumber: Bagian Hukum

Tabel 18 Jumlah produk hukum

No	Produk Hukum	Tahun						Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Usulan Perda	28	22	21	15	12	27	125
2	Penetapan Perda	9	21	18	14	10	11	83
3	Sisa Perda yg blm dibahas	19	1	3	1	2	16	42

Sumber: Bagian Hukum

b. Jumlah permasalahan yang diselesaikan

Untuk mengukur kepastian hukum dalam menjalankan Pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus tetap berusaha agar setiap permasalahan hukum / sengketa hukum yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui jalur Litigasi (persidangan) maupun jalur Non Litigasi (di luar persidangan/mediasi). Jumlah permasalahan hukum / sengketa hukum yang dihadapi selama tahun 2007 s.d tahun 2015 sebanyak 97 permasalahan hukum / sengketa hukum. Jumlah sengketa hukum yang selesai sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 80 sengketa hukum.

Tabel 19 Jumlah permasalahan hukum

Perkembangan Penyelesaian Kasus								
No	Uraian	s.d 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1	Kasus Baru	48	6	16	3	7	17	97
2	Selesai	43	7	8	9	5	8	80
3	Sisa Kasus	5	4	12	6	8	17	17

Sumber data : Bagian Hukum

Jumlah sengketa hukum yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 17 sengketa hukum. Adapun sengketa hukum yang belum terselesaikan diantaranya yaitu:

Tabel 20 Jumlah sengketa hukum

Permasalahan Yang Belum Selesai		
1	123/G/2012/PTUN.SBY	Masih Dalam Peninjauan Kembali, Kasus Pemberhentian Perangkat
2	11/G/2015/PTUN SBY	Masih dalam Kasasi, Kasus Pencatatan Serikat Pekerja
3	55/G/2015/PTUN.SBY	Masih Menunggu Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding. Apakah ada upaya hukum ataukah tidak masih belum tahu
4	70/Pdt.G/2015PN.Sda	Upaya Banding terkait permasalahan Fasum di Perumahan Bluru
5	192/G/2015/PTUN SBY	Masih dalam upaya Banding, Kasus Pencatatan Serikat Pekerja
6	130/Pdt.G/2015/PN.Sda	Masih dalam Proses tingkat pertama, terkait masalah tanah warisan
7	210/Pdt.G/2015/PN.Sda	Masih dalam Proses Persidangan Tingkat Pertama, terkait PHK PT. Yana Prima
8	270/G/2015/PTUN. SBY	Masih dalam proses tingkat pertama, terkait permasalahan tanah di sariogo
9	260/G/2015/PTUN.SBY	Masih dalam proses Tingkat pertama, terkait masalah pencatatan serikat pekerja
10	86/Pdt. G/2014/PN.SDA	Perkara masih dalam upaya Kasasi, masalah Perangkat Desa Seketi yang diberhentikan Kepala Desa terkait habis masa jabatan

2.3.9 Bagian Humas dan Protokol

a. Jumlah media informasi

Jumlah media informasi yang dimiliki Kabupaten sampai dengan tahun 2015 berupa situs sebanyak 1 (satu) domain yaitu <http://www.sidoarjokab.go.id/> dan 50 subdomain yaitu meliputi 18 Kecamatan, 3 Bagian Setda, 21 Unit Kerja, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M), Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi produk Hukum (SJDIH), Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Musrenbang dan E-Monev.

Media informasi selain situs yang dimiliki saat ini yaitu berupa:

- 1) 3 (tiga) papan pengumuman;
- 2) 1 (satu) pos pengaduan;
- 3) 3 (tiga) Leaflet / selayang pandang;
- 4) 1 (satu) media cetak yaitu majalah Gema Delta;
- 5) 1 (satu) media center yaitu media center kabupaten Sidoarjo;

Selain itu juga terdapat Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) yang berfungsi menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan. Realisasi capaian tahun 2015 sebanyak 218 pengaduan yang masuk dari masyarakat dan yang ditindaklanjuti sebanyak 199 pengaduan atau 91,28%.

b. Jumlah media komunikasi

Jumlah media komunikasi yang dimiliki sampai saat ini sebanyak 1 (satu) media yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Media komunikasi tersebut telah ada sejak tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2015 telah diadakan 6 (enam) kali kegiatan dalam rangka media komunikasi, yaitu kegiatan penyuluhan (sosialisasi) KIM di Kecamatan : Jabon, Tanggulangin, Sedati, Porong, Balongbendo dan Krian. Media komunikasi tersebut bertujuan menunjang kelancaran komunikasi antar anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna informasi yang ada. Pada bulan

April 2015 Kelompok Informasi Masyarakat “Melati” Kabupaten Sidoarjo meraih juara III KIM Tingkat Provinsi Jawa Timur.

2.3.10 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, tata usaha, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan 5 program pokok, 23 kegiatan diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa terhadap pelaksanaan beberapa tugas pokok dan fungsi Bagian Umum telah dilaksanakan maksimal. Dan dalam mendukung tugas pokok pelayanan Sekretariat Daerah untuk memberikan saran, masukan serta pertimbangan atas keputusan dan kebijakan kepala daerah, Bagian Umum memberikan pelayanan atas ketersediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.

Dari program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 10 Bagian, telah melaksanakan tugas dengan capaian kinerja masing–masing mencapai rata-rata sebesar 100%. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi titik penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan. Kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, yang ditandai dengan masih adanya pengaduan dan keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan tersebut. Sebab itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis dimana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan. Karena itu prestasi Kinerja Pelayanan Umum Sekretariat merupakan salah satu dari sekian satuan kerja Pemerintah Daerah yang menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah.

Sesungguhnya bila seorang leader mengatakan berhasil mengembangkan kinerja organisasi ataupun meningkatkan pelayanan, tentu ada alasan logis dan normative yang dapat diterima bahwa organisasi tersebut meningkat kinerjanya. Dalam konsep *New Public Management* (NPM) birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (*result*) dibandingkan dengan sekedar kontrol terhadap pembelanjaan anggaran



dan kepatuhan terhadap prosedur. Penekanan terhadap hasil merupakan kritik dan perbaikan atas konsep lama dari public management yang kurang relevan, untuk diterapkan pada masyarakat yang menuntut perbaikan kinerja. Dalam perspektif NPM, konsep lama birokrasi cenderung sentralistik dan lebih berorientasi input dan proses, dinilai telah menjauhkan pelayanan birokrasi dari kebutuhan masyarakat. Salah satu konsep NPM tersebut adalah indikator kinerja keberhasilan lembaga publik. Konsep Pengukuran Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Wujud kinerja organisasi dapat berwujud meningkatnya jumlah pelanggan, barang persediaan dan investasi dan sebagainya. Artinya, sukses sebuah organisasi tidaklah terletak pada banyaknya jumlah program dan tersedianya sejumlah dana maupun sumberdaya yang ada. Prinsip yang berorientasi pada hasil merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) prinsip *reinventing government*, bahwa organisasi publik diharapkan mampu mengembangkan paradigma kewirausahaan yang berorientasi pada hasil yang dicapai; membiayai hasil bukan masukan (*funding outcome not input*). Bertitik tolak dari konsep New Public Management (NPM), Kinerja Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tugas dan fungsinya adalah:

1. Seberapa banyak hasil koordinasi dan tercapainya hasil perumusan kebijakan Sekretariat Daerah berdasarkan situasi dan kondisi pada tahun tersebut.
2. Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil perencanaan, hasil evaluasi dan terselenggaranya pengendalian kegiatan maupun kebijakan pemerintah daerah.
3. Jumlah pengelolaan sumber daya aparatur, sumber dana anggaran serta terkelolanya sarana dan prasarana yang ada.

4. Seberapa besar terpantaunya kegiatan dan evaluasi hasil- hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
5. Jumlah efektifitas dan efiesiensi pelaksanaan tugas kegiatan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dimana dalam konsep *New Public Management (NPM)*, birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang idealnya dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result) dibandingkan dengan sekedar control terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ada. Dari hasil telaahan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan hasil analisis terhadap pembelanjaan anggaran dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun. Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang dan tantangan tersebut antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

a. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas yang berjalan dalam Sekretariat Daerah Sidoarjo dirasa masih belum maksimal. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu merencanakan pembangunan pelayanan yang dibarengi reformasi birokrasi seperti halnya menyusun sebuah Standard Operational Procedure (SOP), Standar Anggaran Biaya (SAB) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan

b. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas

Ketersediaan SDM yang mumpuni dan berkualitas sesuai dengan bidang akan menghasilkan rumusan kebijakan Bupati yang berkualitas sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing bagian yang ada. Demikian juga halnya dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan serta mutu SDM yang baik juga akan menghasilkan layanan yang baik dan bermutu pula, apakah kepada sesama instansi pemerintah, pimpinan daerah maupun pada masyarakat pada umumnya.

c. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa masih banyaknya aparatur pemerintah yang belum menyadari akan tuntutan reformasi birokrasi saat ini. Masyarakat telah menuntut keterbukaan informasi dalam pelayanan dan tuntutan akan birokrasi adalah pelayan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu merencanakan pembangunan pelayanan yang dibarengi reformasi birokrasi seperti halnya menyusun sebuah Standard Operational Procedure (SOP), Standar Anggaran Biaya (SAB) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan pembinaan pegawai dalam rangka reformasi birokrasi.

d. Masih belum mandirinya SDM di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Hal ini dapat dijelaskan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam menghasilkan suatu rumusan kebijakan, seringkali karena keterbatasan pengetahuan, mutu atau kualitas atau karena faktor lainnya, menggunakan jasa pihak ketiga sebagai nara sumber, konsultan atau pendampingan lainnya. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi seringkali dalam pelaksanaannya disalah-artikan, bahwa pendampingan oleh pihak ketiga seharusnya hanya sebatas sumbangan pemikiran sesuai keahliannya dan bukan sepenuhnya pekerjaan dimaksud diberikan kepada pendamping dimaksud. Dampak negatifnya adalah kita

akan selalu tergantung, tidak berupaya berfikir sebagaimana fungsinya dan hanya mengikuti semua olah pikir pihak pendamping tersebut.

2.4.2 Peluang Pengembangan SKPD

a. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penetapan indikator kinerja dan capaian analisis kinerja dengan baik

b. Banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan

Keberadaan Perda tidak dapat lagi dilepaskan dari soal otonomi daerah. Dalam konteks ini otonomi daerah seharusnya tidak diartikulasi sebagai tujuan akhir dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintah. Melalui Perda yang diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha menciptakan keteraturan hukum yang sesuai dengan kearifan local daerahnya. Disamping itu pembuatan banyak Perda diharapkan mampu menciptakan keefektifan kinerja pelayanan pemerintah daerah.

c. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana merupakan factor penting dalam menciptakan keefektifan pencapaian tujuan pemerintah daerah. Karena sarana dan prasarana menunjang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Guna menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, pengadaan sarana dan prasaran terus dilakukan. Selain itu sarana dan prasarana yang telah tersedia juga terus dilakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap fungsinya.

Bab 3: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 21 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal (Diluar Kewenangan Skpd)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber daya Manusia	Belum secara maksimal meratanya pendidikan	Program pendidikan 12 tahun	Koordinasi pelayanan pendidikan	Akses pendidikan yang belum sampai pada masyarakat	Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas kerja yang masih rendah	Tingkat beban kerja	Masih bingung dalam SOP pelaksanaan Kerja		Masih perlunya pengembangan inisiatif bagi seluruh SDM

Efektivitas Kinerja	Kinerja belum optimal	Capaian kinerja	Kemandirian tugas mengembangka tugas		Masih belum mandiriya SDM di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo,
Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang belum optimal			Komitmen pemerintah pusat	Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
kelembagaan	Belum optimal	Efektivitas kinerja lembaga	Kelembagaan yang dinamis		Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah

3.2 Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah Terpilih

Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati terpilih yang menjabat saat ini menetapkan visi pembangunan lima tahun kedepan dengan bunyi **“KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**. Visi ini didukung oleh lima misi untuk mewujudkannya. Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pernerintah Yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan;
2. Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, UMKM Dan Koperasi Serta Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatnya Kualitas Dan Standar Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;
4. Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berakhlakul Kharimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, Serta Dapat Memelihara Kerukunanm Ketentraman Dan Ketertiban;

5. Kualitas Infrastruktur Yang Memadai Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Tabel 22 Visi, Misi dan Program Kabupaten Terpilih

Visi: Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan;	Ketatalaksanaan lembaga yang belum optimal Reformasi birokrasi belum maksimal dijalankan Policy Brief yang belum terlaksana dengan baik	Masih terbatasnya kapasitas sdm aparatur	Komitmen pemimpin untuk memperbaiki kinerja aparatur

Berdasarkan pada Visi Misi Tersebut, Sekretariat daerah memiliki keterkaitan dengan Misi 1 secara berurutan yaitu, Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan.

Dari misi yang berkenaan dengan Tupoksi tersebut, terdapat sasaran yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah yaitu Meningkatkan peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

3.3 Telaah Renstra K/L & Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Sekretariat Negara 2014-2018

Untuk mendukung sinkronisasi dokumen dengan lembaga yang memiliki scope lebih besar, maka dilakukan telaah terhadap renstra Kementerian Sekretariat Negara Periode 2014-2018. Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwasannya arah kebijakan pada kementerian sekretariat Negara adalah:

1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup peningkatan:
 - a. Kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;
 - d. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
 - e. Kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat pemerintahan, TNI, dan POLRI;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat Negara tertentu
3. Meningkatkan pelayanan Dukungan teknis Dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, Mencakup peningkatan:
 - a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan
 - b. Hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan
 - c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat
4. Meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur

3.3.2 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi 2014-2018

Telaah pada renstra provinsi dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda pembangunan yang memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu untuk melihat beberapa hal yang mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten atau kota yang berhubungan dengan Tupoksi Sekretariat daerah. Merujuk ada SOTK Sekretariat daerah, dapat dilihat bahwasannya terdapat biro yang hanya memiliki kewenangan untuk mengurus kinerja pada lingkup Internal pemerintahan Provinsi, kewenangannya tidak melibatkan instansi diluar provinsi dan terdapat Biro yang kewenangannya melibatkan dukungan dari instansi diluar provinsi diluar Lingkup profinsi. Berikut merupakan beberapa Biro yang memiliki sasaran maupun kebijakan yang bersentuhan dengan Sekretariat daerah kabupaten Sidoarjo:

1. Biro Administrasi Pembangunan

Biro administrasi pembangunan memiliki satu tujuan dan satu sasaran, tujuan Sekretariat Daerah adalah “Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD”. Dan sasaran pembangunannya adalah “Meningkatnya tertib administrasi pembangunan” sasaran pembangunan Provinsi yang hanya satu tersebut ditunjang oleh 7 strategi meliputi:

- a. Pembinaan, fasilitasi dan pendidikan dalam rangka peningkatan inovasi
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem informasi pengadaan barang dan jasa
- c. Meningkatkan penataan sistem moneyv dalam penyerapan dana APBD maupun APBN yang relevan dan konsisten
- d. Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur di Jawa Timur
- e. Meningkatkan tertib administrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD
- f. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur
- g. Meningkatkan sistem E-Government yang terintegrasi

2. Biro Perkonomian

Berikut merupakan tujuan pembangunan Biro Adinistrasi Perekonomian pada periode 2014-2019:

- a. Terlaksananya Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi dan UMKM.
- b. Terlaksananya Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
- c. Terlaksananya Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengumpulan informasi hasil tembakau illegal.
- d. Terlaksananya Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran beras miskin (raskin).

- e. Terlaksananya Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang penanaman modal dan BUMD.
- f. Terlaksananya Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan.
- g. Terlaksananya Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi.
- h. Terlaksananya Perumusan Kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sarana perekonomian.
- i. Terlaksananya Perumusan Kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan pengembangan teknologi.

Sedangkan sasaran pembangunan Biro Administrasi Perekonomian untuk periode pembangunan tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan UMKM yang terfasilitasi Dana Bergulir.
- b. Peningkatan jumlah Kab/Kota yang menggunakan DBHCHT sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengumpulan informasi tembakau ilegal yang berimplikasi pada penerimaan cukai Negara untuk mendorong penerimaan DBHCHT di daerah.
- d. Peningkatan jumlah Kab/Kota yang melakukan penyaluran Raskin sesuai pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan.
- e. Peningkatan Laba BUMD Jawa Timur.
- f. Peningkatan jumlah BUMD yang melakukan prinsip GCG
- g. Peningkatan jumlah BUMD yang melakukan Budaya Kerja
- h. Peningkatan promosi dan misi dagang dalam dan luar negeri fasilitasi Promosi dan Misi dagang dalam/luar negeri.
- i. Pengendalian tingkat inflasi di Jawa Timur.
- j. Meningkatnya jumlah Kab/kota yang memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi kreatif.
- k. Meningkatnya jumlah kab.kota yang menggunakan Teknologi untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan lokal

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sekretariat bukan dinas yang bersentuhan langsung dengan RTRW. Namun dalam pembuatan kebijakan harus memperhatikan kebijakan yang tertuang pada RTRW, salah satunya kebijakan penetapan kawasan strategis. Kebijakan penetapan kawasan strategis Kabupaten Sidoarjo dilakukan pada kawasan yang memiliki pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah sekitarnya, kegiatan lain yang sejenis maupun tidak sejenis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Strategi penataan pada kawasan strategis dilakukan dengan :

- a. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
- b. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi
- c. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya
- d. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi
- e. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Sesuai pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD, ada beberapa SKPD yang bersentuhan langsung pada KLHS. Tetapi Sekretariat Daerah tidak langsung mengakomodir kebijakan yang ada pada KLHS. Kebutuhan Sekretariat Daerah terhadap KLHS hanya pada memperhatikan KLHS pada lingkup kegiatan pelaksanaan, untuk program tidak ada yang langsung terkait KLHS

3.5 Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada level provinsi dan permasalahan pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Sidoarjo disusun untuk pembenahan dan dipertahankan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program, Kegiatan dan Kebutuhan teknis operasional. Pada tataran klasifikasi Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya system akuntabilitas kinerja bagi aparatur
2. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas
3. Kurang Optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan public
4. Masih belum mandiri SDM di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB 4: TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

4.1.1 Tujuan

Rencana Strategis mengacu visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk menyelaraskan maka perlu menerjemahkan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Maka sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Daerah berikut Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakomodir oleh Sekretariat Daerah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan”

Penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berfungsi memfasilitasi perumusan kebijakan. Sekretariat Daerah memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah wajib mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Sekretariat Daerah harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan

yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas. Berikut tujuan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

“Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah”

4.1.2 Sasaran

Setelah menetapkan tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

“Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo”

Untuk memperoleh sasaran yang dapat dicapai maka ditentukan suatu indikator kinerja. Indikator kinerja disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja direncanakan dalam periode lima tahun. Tabel pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sampai indikator kinerja pelayanan Sekretariat daerah selanjutnya disusun dalam tabel berikut:

Tabel 23 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan	1.Persentase implementasi produk hukum daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		pembangunan di Kabupaten Sidoarjo						
			2.Persentase implementasi kebijakan daerah;					
			a. Bidang Pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			b. Bidang Perekonomian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			c. Bidang Kesra	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			d. Bidang PBJ	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			e. Bidang Organisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			f. Bidang Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3.Persentase IKU OPD yang mencapai target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			4.Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			5.Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	-	-	75	75	75
			6.Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	-	-	75	75	75

BAB 5: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal

dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

Tabel 24 Identifikasi SWOT

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
SDM yang cukup melimpah	Laba BKD secara berlahan meningkat
Komitmen aparatur yang kuat	sarana dan prasarana memadai
adanya peningkatan anggaran setiap tahun	
Nilai LPPD berstatus sangat bagus	
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
perda banyak yang belum dibahas	Sumberdaya manusia yang kurang kompeten dalam perumusan kebijakan
kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan pblik	program yang hanya bersifat teknis, tidak sesuai dengan tupoksi
kurang inisiatif dalam pelaksanaan tugas	belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja aparatur
permasalahan hukum kecenderungan meningkat	

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Sekretariat Daerah. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Tabel 25 Rumusan SWOT

	Peluang :	Tantangan:
	Laba BKD secara berlahan meningkat	Sumberdaya manusia yang kurang kompeten dalam perumusan kebijakan
	sarana dan prasarana memadai	program yang hanya bersifat teknis, tidak sesuai dengan tupoksi
	Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja	belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja aparatur
Kekuatan :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :

SDM yang cukup melimpah	mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah	Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional
Komitmen aparatur yang kuat		
adanya peningkatan anggaran setiap tahun		
Nilai LPPD berstatus sangat bagus		
Kelemahan:	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
perda banyak yang belum dibahas	Menguatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan
kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan pblik		
kurang inisiatif dalam pelaksanaan tugas		
permasalahan hukum kecenderungan meningkat		
belum optimalnya koordinasi dan penyelenggaraan kerjasama daerah		

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat 4 alternatif strategi sebagai berikut:

St1. mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah

St2. Menguatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa

St3. Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional

St4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan

Strategi yang diinisiasi berdasarkan pada analisis isu strategis serta analisis SWOT tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced scorecard melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- 2 Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
- 3 Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
- 4 Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 26 Tabel Kebijakan Umum

No.	Perspektif	Strategi 1: mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalisasi teknis administrasi perkantoran	Program Pelayanan administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Program Disiplin Aparatur

3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan	Program Koordinasi rumusan kebijakan pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan
4	Perspektif Keuangan	Meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan *
No.	Perspektif	Strategi 2: Memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat		
2	Perspektif proses Internal	pembinaan administrasi pemerintahan umum dan desa	Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum, pemerintahan desa, dan administrasi pertanaha
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 3: Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan pelayanan informasi dan telekomunikasi	Program pelayanan informasi dan pemberitaan, pengelolaan, pengaduan, keprotokolan dan dokumentasi
2	Perspektif proses Internal	Meningkatkan fasilitasi kerjama dengan lembaga pemerinatah maupun non-pemerintah	Program Administrasi Kerjasama *
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik *
4	Perspektif Keuangan		
No.	Perspektif	Strategi 4: Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	meningkatkan jumlah perumusan kebijakan yang diimplementasikan	1. Program Koordinasi kebijakan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan* 2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum * 3. Program koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian, pertanian dan BUMD * 4. Program Koordinasi Kebijakan dan Pelayanan bidang telematika dan Persandian *
2	Perspektif proses Internal		
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan	-	-

Tabel 27 Linearitas Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi produk hukum daerah
			Persentase implementasi kebijakan daerah; a. Bidang Pembangunan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesra d. Bidang PBJ e. Bidang Organisasi f. Bidang Pemerintahan
			Persentase IKU OPD yang mencapai target
			Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik
			Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah
			Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Tabel 28 Matrik Rencana Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU											
			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1. Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik		100 %	Rp.637.339.800	100 %	Rp.950.848.600	100 %	Rp.1.108.545.000	100 %	Rp.1.254.127.000	100 %	Rp.1.420.961.325	-	-
1. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Rp.353.839.200	2 dokumen	Rp.507.044.000	2 dokumen	Rp.111.245.000	2 dokumen	Rp.122.369.500	2 dokumen	-	-	-
2. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil money kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang ditindaklanjuti	20 %	20 %	Rp.95.384.600	80 %	Rp.137.584.600	80 %	Rp.61.550.000	80 %	Rp.67.705.000	80 %	-	-	-
3. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	5 merk	5 merk	Rp.52.165.000	5 merk	Rp.77.000.000	5 merk	Rp.77.000.000	5 merk	Rp.92.400.000	5 merk	-	-	-
4. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta	Jumlah jenis media publikasi ketentuan terkait cukai yang digunakan	N/A	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	3 jenis	Rp.398.000.000	3 jenis	Rp.437.800.000	3 jenis	-	-	-

	pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai														
	5. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang disusun	N/A	3 dokumen	Rp.52.165.000	3 dokumen	Rp.111.125.000	3 dokumen	Rp.220.000.000	3 dokumen	Rp.264.000.000	3 dokumen	Rp.316.800.000	-	-
		-	N/A	3 fasilitasi		-									
	6. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Perikanan serta Perikanan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan dan pertanian serta perikanan yang disusun	N/A	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	3 laporan	Rp.61.000.000	3 laporan	Rp.70.150.000	3 laporan	Rp.80.672.500	-	-
	7. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Pertanian serta Perikanan	Persentase hasil Monev kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan dan pertanian serta perikanan yang ditindaklanjuti	N/A	20 %	Rp.18.200.000	20 %	Rp.20.020.000	80 %	Rp.39.550.000	80 %	Rp.45.482.500	80 %	Rp.52.304.875	-	-
	8. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang ditindaklanjuti.	N/A	20 %	Rp.65.586.000	80 %	Rp.98.075.000	80 %	Rp.140.200.000	80 %	Rp.154.220.000	80 %	Rp.169.642.000	-	-
	2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	N/A	100 %	Rp.3.265.428.900	100 %	Rp.1.527.293.075	100 %	Rp.4.848.446.079	100 %	Rp.3.738.857.700	100 %	Rp.4.520.461.690	-	-
	1. Fasilitasi kerjasama	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100 %	100 %	Rp.2.430.490.000	100 %	Rp.543.450.000	100 %	Rp.2.745.157.150	100 %	Rp.767.450.000	100 %	Rp.884.195.000	-	-
	2. Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi	Jumlah kecamatan yang dilakukan inventarisasi data gasetir rupa bumi unsur buatan												-	-
	3. Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah pilar batas kelurahan/ desa													

		Jumlah pilar batas kecamatan													
		Jumlah pilar batas daerah													
		Jumlah laporan pengukuran pilar batas dengan GPS Geodetik													
		Jumlah laporan pembuatan peta batas desa berbasis citra													
		Jumlah peta batas desa yang di cetak													
		Jumlah laporan monev pemasangan pilar batas wilayah													
		Jumlah laporan pembuatan sistem informasi ruas batas dan pilar batas wilayah berbasis citra													
	4. Penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik													
		-													
	5. Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelayanan kedinasan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintah dan yang disusun													
		Jumlah laporan monev penyelenggaraan dan pemerintaha umum													
		Jumlah laporan monev standart pelayanan minimal													
	3. Program Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa		N/A	N/A	Rp.0	Level 2	Rp.2.018.232.397	Level 3	Rp.3.170.213.000	Level 3	Rp.5.079.965.000	Level 4	Rp.5.813.706.250	-	-
	1. Fasilitas dan pengelolaan LPSE	Persentase ketersediaan layanan LPSE online	100 %	100 %	Rp.0	100 %	Rp.480.215.000	100 %	Rp.1.430.315.000	100 %	Rp.2.200.000.000	100 %	Rp.2.420.000.000	-	-

	2. Fasilitas pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	Persentase paket pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkiraan RUP	0 paket	0 paket	Rp.0	300 paket	Rp.1.235.060.600	450 paket	Rp.703.310.000	500 paket	Rp.1.054.965.000	500 paket	Rp.1.318.706.250	-	-
		Persentase penawaran penyedia yang memenuhi persyaratan dokumen pengadaan	N/A	N/A		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
	3. Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	Persentase permasalahan yang di advokasi	100 %	100 %	Rp.0	100 %	Rp.0	100 %	Rp.711.588.000	100 %	Rp.1.500.000.000	100 %	Rp.1.750.000.000	-	-
	4. Pembinaan pengadaan barang dan jasa	Persentase OPD dengan pemakatan PBJ yang sesuai	0 %	0 %	Rp.0	0 %	Rp.302.956.797	75 %	Rp.325.000.000	80 %	Rp.325.000.000	85 %	Rp.325.000.000	-	-
		-	0 %	0 %		0 %		0 %		80 %		85 %		-	
	4. Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan masyarakatan yang diterapkan	N/A	100 %	Rp.1.233.265.100	100 %	Rp.1.356.591.610	100 %	Rp.1.492.250.771	100 %	Rp.1.641.475.848	100 %	Rp.1.805.623.433	-	-
	1. Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev agama dan masyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang agama dan masyarakatan yang disusun	N/A	4 kebijakan	Rp.33.417.100	4 kebijakan	Rp.36.758.810	4 kebijakan	Rp.40.434.691	4 kebijakan	Rp.44.478.160	4 kebijakan	Rp.48.925.976	-	-
		Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang agama dan masyarakatan yang ditindaklanjuti	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
	2. Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang disusun	N/A	4 kebijakan	Rp.253.550.000	4 kebijakan	Rp.278.905.000	4 kebijakan	Rp.306.795.500	4 kebijakan	Rp.337.475.050	4 kebijakan	Rp.371.222.555	-	-
		Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
	3. Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan	Persentase lembaga yang mendapatkan bantuan yang bebas dari penyalahgunaan anggaran	N/A	100 %	Rp.946.298.000	100 %	Rp.1.040.927.800	100 %	Rp.1.145.020.580	100 %	Rp.1.259.522.638	100 %	Rp.1.385.474.902	-	-

		persentase peserta hasil binaan seleksi MTQ yang berprestasi.	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
		Persentase proposal hasil seleksi yang memperoleh bantuan.	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
		Jumlah jamaah haji yang difasilitasi keberangkatannya	N/A	2800 orang		3000 orang		3200 orang		3400 orang		3600 orang		-	
		5. Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokol dan rumah tangga pimpinan daerah.	N/A	80 %	Rp.7.849.550.972	81 %	Rp.8.634.506.069	82 %	Rp.9.497.956.676	83 %	Rp.10.447.752.344	84 %	Rp.11.492.527.578	-	-
	1. Koordinasi Kegiatan Keprotokol, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah	Persentase kegiatan pimpinan Daerah yang difasilitasi Protokoler	N/A	100 %	Rp.2.200.650.000	100 %	Rp.2.420.715.000	100 %	Rp.2.662.786.500	100 %	Rp.2.929.065.150	100 %	-	-	-
	2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	N/A	100 %	Rp.5.648.900.972	100 %	Rp.6.213.791.069	100 %	Rp.6.835.170.176	100 %	Rp.7.518.687.194	100 %	Rp.8.270.555.913	-	-
	6. Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Prosentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti	N/A	100 %	Rp.1.295.000.000	100 %	Rp.1.327.000.000	100 %	Rp.1.425.000.000	100 %	Rp.1.446.000.000	100 %	Rp.1.512.500.000	-	-
		Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik	N/A	75 %		80 %		90 %		100 %		100 %		-	
	1. Monev Kelembagaan, Anjab, dan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang telah dievaluasi kelembagaannya	100 %	100 %	Rp.240.000.000	100 %	Rp.265.000.000	100 %	Rp.282.000.000	100 %	Rp.300.000.000	100 %	Rp.315.000.000	-	-
		Persentase OPD yang sudah memanfaatkan ANJAB dan ABK nya	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
		Nilai PMPRB	0	0		0		65		66		68		-	

	2. Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase pegawai sekretariat daerah yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	100 %	100 %	Rp.80.000.000	100 %	Rp.87.000.000	100 %	Rp.93.000.000	100 %	Rp.96.000.000	100 %	Rp.97.500.000	-	-
		Persentase disiplin pegawai sekretariat daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
		Hasil Perjanjian Kinerja Individu dengan nilai diatas 90 %	N/A	N/A		N/A		100 %		100 %		100 %		-	
	3. Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang Melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	90 %	100 %	Rp.975.000.000	100 %	Rp.975.000.000	100 %	Rp.1.050.000.000	100 %	Rp.1.050.000.000	100 %	Rp.1.100.000.000	-	-
		Persentase PD Pelayanan yang Menerapkan Standart Pelayanan dan SOP	85 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelompok budaya kerja	50 %	80 %		85 %		90 %		95 %		100 %		-	
	7. Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System)	N/A	N/A	Rp.1.017.956.637	100 %	Rp.1.119.751.421	100 %	Rp.1.210.000.000	100 %	Rp.1.330.000.000	100 %	Rp.1.460.000.000	-	-
		Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	N/A	87 %		87 %		87 %		87 %		87 %		-	
		Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	N/A	8 Dokumen		-									
		Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerja telah sesuai dengan dok Perencanaan Diatasnya	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	

	1. Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.	Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun	2 kebijakan	2 kebijakan	Rp.260.638.800	3 kebijakan	Rp.286.701.800	3 kebijakan	Rp.290.000.000	3 kebijakan	Rp.300.000.000	3 kebijakan	Rp.310.000.000	-	-
		Sub sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) yang dikembangkan	N/A	4 sub sistem		2 sub sistem		2 sub sistem		2 sub sistem		1 sub sistem		-	
		Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem aplikasi RDS (Regional Development System)	N/A	N/A		47 OPD		47 OPD		47 OPD		47 OPD		-	
	2. Pengendalian Kegiatan Pembangunan daerah	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi ≥ 90 %	100 %	100 %	Rp.102.930.000	100 %	Rp.113.223.000	100 %	Rp.120.000.000	100 %	Rp.130.000.000	100 %	Rp.150.000.000	-	-
	3. Penyusunan Pelaporan Kinerja Daerah (LKPD, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	Jumlah dok pelaporan kinerja daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	Rp.422.448.000	8 dokumen	Rp.464.692.800	8 dokumen	Rp.500.000.000	8 dokumen	Rp.550.000.000	8 dokumen	Rp.600.000.000	-	-
	4. Fasilitasi Penyusunan Ukuran Kinerja Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi ukuran kinerjanya	100 %	100 %	Rp.231.939.837	100 %	Rp.255.133.821	100 %	Rp.300.000.000	100 %	Rp.350.000.000	100 %	Rp.400.000.000	-	-
	8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Prosentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	N/A	100 %	Rp.2.218.115.000	100 %	Rp.1.499.624.000	100 %	Rp.1.018.466.900	100 %	Rp.1.096.805.000	100 %	Rp.1.148.800.000	-	-
		Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
		Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	
	1. Perencanaan dan pembahasan produk hukum daerah	Jumlah penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	N/A	5 perda	Rp.1.106.580.000	5 perda	Rp.727.360.000	5 perda	Rp.382.103.900	5 perda	Rp.392.000.000	5 perda	Rp.402.000.000	-	-
		Jumlah penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	N/A	25 perbub		25 perbub		25 perbub		30 perbub		30 perbub		-	
		Jumlah penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	N/A	400 SK		400 SK		400 SK		450 SK		450 SK		-	

	2. Penyusunan jawaban eksekutif	Persentase butir-butir pandangan umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif.	N/A	100 %	Rp.49.000.000	100 %	Rp.15.844.000	100 %	Rp.18.303.000	100 %	Rp.19.305.000	100 %	Rp.19.800.000	-	-
	3. Pengelolaan kajian dan dokumentasi hukum	Persentase hasil temuan kajian produk hukum yang ditindaklanjuti penyempurnaannya	N/A	100 %	Rp.347.835.000	100 %	Rp.276.420.000	100 %	Rp.225.250.000	100 %	Rp.250.500.000	100 %	Rp.265.000.000	-	-
		Jumlah produk hukum yang didokumentasikan (manual dan elektronik)	N/A	1000		1200		800		500		500		-	
	4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	Persentase permintaan bantuan hukum terkait permasalahan hukum daerah yang difasilitasi	N/A	100 %	Rp.714.700.000	100 %	Rp.480.000.000	100 %	Rp.392.810.000	100 %	Rp.435.000.000	100 %	Rp.462.000.000	-	-
		Persentase permasalahan hukum daerah yang difasilitasi penyelesaiannya	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		-			
		Persentase perangkat daerah dan desa yang telah diberi penyuluhan hukum	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		-			
	9. Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparat perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan								100%	Rp 16.174.208.381	100%	Rp 17.791.629.219	-	-
	1. Penyediaan barang jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola								22440 buah		22440 buah		-	-
		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar								67 Orang/bulan		67 Orang/bulan		-	-
		Jumlah BBM yang disediakan								2 jenis		2 jenis		-	-
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya								30 unit		30 unit		-	-
		Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan								3 jenis		3 jenis		-	-
		Rekening listrik,air, telepon dan internet yang terbayar								12 bulan		12 bulan		-	-
		Jumlah premi asuransi barang								-		-		-	-

		milik daerah yang terbayar												
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia							2 jenis		2 jenis		-	
		Jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia							20 jenis		20 jenis		-	
		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia							-		-		-	
		Jumlah alat tulis kantor dan cetak pengadaan yang tersedia							90 jenis		90 jenis		-	
		Jumlah tenaga penunjang pelayanan adminidtrasi perkantoran yang tersedia							42 orang		42 orang		-	
		Jumlah jam lembur yang terbayar							3500 jam		3500 jam		-	
	2. Kegiatan Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti							100%	Rp 814.825.000	100%	Rp 896.307.500	-	-
	3. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun							9 laporan		9 laporan		-	-
	4. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor/ rumah jabatan/ dinas yang dibangun											-	-
		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan							2 unit				-	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor/ rumah dinas/ jabatan yang diadakan							20 jenis	Rp 4.206.353.270	20 jenis	Rp 1.606.353.270	-	
		Jumlah luas gedung/ kantor/ rumah dinas / jabatan yang di rehab											-	
	5. Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah gedung/ kantor/ rumah dinas/ jabatan yang dipelihara							4 gedung	Rp 2.897.762.298	4 gedung	Rp 3.187.538.528	-	-
		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara							30 unit		30 unit		-	

		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor/ rumah dinas jabatan yang dipelihara							15 jenis		15 jenis		-	
	6. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia							189 buah	Rp 267.861.300	189 buah	Rp 294.647.430	-	-
		Jumlah pakaian hari- hari tertentu							189 buah		189 buah		-	
	7. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun							8 dokumen		8 dokumen		-	-
		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)							4 dokumen	Rp 13.127.600	4 dokumen	Rp 14.440.360	-	
		Jumlah data informasi yang disusun							-		-		-	
	8. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun							4 dokumen		4 dokumen		-	-
		Jumlah Dokumen SKM yang disusun								Rp 756.000		Rp 831.600	-	
		Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun							2 dokumen		2 dokumen		-	
	9. Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun							17 laporan	Rp 5.986.584	17 laporan	Rp 6.585.242	-	-

MATRIK MAPPING KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Permendagri No.90 Tahun 2019			Pemutakhiran Permendagri No.90 Tahun 2019 (Surat Bina Keuda Kemendagri tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 050/4189/Keuda)		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1) Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerja telah sesuai dengan dok Perencanaan Diatasnya	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerja telah sesuai dengan dok Perencanaan Diatasnya	100%
	2) Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LAKIP, PK dan IKU/IKI) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%		2) Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LAKIP, PK dan IKU/IKI) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%
	3) Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik	100%		3) Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik	100%
	4) Prosentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti	100%		4) Prosentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti	100%
	5) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	BAIK		5) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	BAIK

		6) Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan, keprotokolannya, dan Rumah Tangga	BAIK			6) Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan, keprotokolannya, dan Rumah Tangga	BAIK
	Pelaksanaan Administrasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kesekretariatan	BAIK		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	
	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	22440 Buah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	8 dokumen
		Jumlah PNS yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan (BPJS)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah mesin absensi yang diadakan			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah pakaian korpri yang diadakan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen

					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 dokumen
		Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	
		Jenis buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	2 Jenis		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun
		Jenis alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	90 Jenis		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-
		Persentase pegawai sekretariat daerah yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	100%		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	-
		Persentase disiplin pegawai sekretariat daerah	100%		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan penatausahaan akuntansi keuangan PD yang disusun	-
		Hasil Perjanjian Kinerja Individu dengan nilai diatas 90 %	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	14 dokumen
		Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	12 ORANG		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksaan yang disusun	-
	Pengelola Perlengkapan	1) Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	-

					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
		2) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	-
		3) Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	20 Jenis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
		4) Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	19 jenis
		5) Jumlah gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	4 Gedung		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis
		6) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 Jenis		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	-
		7) Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	15 Jenis		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1 tahun
		8) Jumlah BBM yang disediakan	2 Jenis		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	3000 buah
		9) Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	30 Unit		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	-

		10) Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	3 Jenis		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	1 tahun
		11) Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar			Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1 tahun
		12) Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	20 Jenis		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	100%
		13) Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	-
		14) Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	9 Laporan		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data dan informasi PD yang tersedia	-
		15) Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	19 ORANG		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	
		16) Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	10 ORANG		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	-
	Pengelola Rumah Tangga	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-

					Operasional atau Lapangan		
		Jumlah luas rumah jabatan yang dipelihara			Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	-
		Jumlah luas rumah dinas yang dipelihara			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	-
		Jumlah luas gedung/kantor yang dipelihara			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	-
		Jumlah tanaman yang disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	11 unit
		Jumlah bahan baku bangunan yang tersedia			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	-
		Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara;			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-
		Jumlah luas rumah jabatan yang direhab sedang/berat			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-
		Jumlah luas rumah dinas yang direhab sedang/berat			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-

		Jumlah luas gedung/kantor yang direhab sedang/berat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	
		Jumlah mobil jabatan yang direhab sedang/berat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	20000 surat
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab sedang/berat		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan
		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	100%
		Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 4.. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 67 orang 2. 8 orang 3. 19 orang 4. 12 orang
		Jumlah mobil jabatan yang diadakan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	
Perencanaan dan Keuangan		Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan PD yang disusun	35 DOKUMEN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	1 tahun

					atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pengelolaan Perencanaan	1) Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	8 Dokumen		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1 tahun
		2) Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	4 Dokumen		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara b. Jumlah Alat Besar yang diurus perijinannya	-
	Penatausahaan Pelaporan	1) Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 Dokumen		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diurus perijinannya	-
		2) Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	2 Dokumen		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	1 tahun
	Pengelolaan Keuangan	1) Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	17 Dokumen		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 tahun
		2) Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	67 Orang / Bulan		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	-

		3) Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 tahun
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	-
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	-
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	-
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	-
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan	-
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	-

						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	-
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	-
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	-
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	2 laporan

					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi	-
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian	-
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD SKPD yang dilakukan	-
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	1. 9 laporan 2. 4 laporan
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	-
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik 2. Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan	-
	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan, keprotokolan, dan Rumah Tangga	BAIK		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100%

	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase kegiatan pimpinan Daerah yang difasilitasi Protokoler	100%		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	100%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase komunikasi pimpinan daerah yang difasilitasi	100%		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	100%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan yang difasilitasi	100%		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Dipenuhi	100%
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Stel
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100%
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	12 bulan

					Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	100%
					Fasilitasi Keprotokolan	Persentase kegiatan pimpinan Daerah yang difasilitasi Protokoler	100%
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase komunikasi kegiatan Pimpinan Daerah yang difasilitasi	100%
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase kegiatan Pimpinan Daerah yang terdokumentasi	100%
	Penataan organisasi	1) Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik; 2) Prosentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti	100% 100%		Penataan organisasi	1) Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang SKMnya berkategori baik; 2) Prosentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti	100% 100%
	Pengelola kelembagaan dan analisa jabatan	1) Persentase perangkat daerah yang telah dievaluasi kelembagaannya; 2) Persentase OPD yang sudah memanfaatkan ANJAB dan ABK nya	100% 100%		Pengelola kelembagaan dan analisa jabatan	1) Persentase perangkat daerah yang telah dievaluasi kelembagaannya; 2) Persentase OPD yang sudah memanfaatkan ANJAB dan ABK nya	100% 100%

Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	1) Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang Melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat); 2) Persentase PD Pelayanan yang Menerapkan Standart Pelayanan dan SOP; 3) Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelompok budaya kerja.	100% 80% 70%	Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	1) Persentase PD Pelayanan yang Menerapkan Standart Pelayanan dan SOP; 2) Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelompok budaya kerja.	80% 70%
Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1) Persentase OPD yang telah mencukupi dokumen pendukung PMPRB dengan lengkap dan sesuai ketentuan; 2) Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi ukuran kinerjanya	100% 100%	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1) Persentase OPD yang telah mencukupi dokumen pendukung PMPRB dengan lengkap dan sesuai ketentuan; 2) Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi ukuran kinerjanya	100% 100%
			Monitoring, Evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang Melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat);	100%
			Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Persentase PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	100%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1) Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1) Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang	100%

		2) Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%			2) Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%
		3) Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%			3) Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%
		4) Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan	100%			4) Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan	100%
		5) Prosentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%			5) Prosentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%
		6) Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LPPD, IKK LPPD dan RLPPD) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%			6) Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LPPD, IKK LPPD dan RLPPD) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	100%		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	100%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan monev penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun	1 Laporan		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan monev penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun	1 Laporan
		Jumlah laporan monev bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	1 Laporan			Jumlah laporan monev bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	1 Laporan

		Jumlah laporan monev bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang disusun	1 Laporan			Jumlah laporan monev bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang disusun	1 Laporan
		Jumlah laporan monev bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang disusun	1 Laporan			Jumlah laporan monev bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang disusun	1 Laporan
		Jumlah laporan monev administrasi pemerintahan yang disusun	1 Laporan			Jumlah laporan monev administrasi pemerintahan yang disusun	1 Laporan
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1) Persentase kecamatan yang dilakukan inventarisasi data gasetir rupabumi unsur buatan	100%		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1) Persentase kecamatan yang dilakukan inventarisasi data gasetir rupabumi unsur buatan	100%
		2) Persentase kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik	100%			2) Persentase kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik	100%
		3) Jumlah laporan monev pemasangan pilar batas wilayah yang disusun	100%			3) Jumlah laporan monev pemasangan pilar batas wilayah yang disusun	100%
		4) Persentase progres pembuatan sistem informasi ruas batas dan pilar batas wilayah berbasis citra	100%			4) Persentase progres pembuatan sistem informasi ruas batas dan pilar batas wilayah berbasis citra	100%

		5) Persentase titik - titik pilar batas yang telah ditetapkan	100%			5) Persentase titik - titik pilar batas yang telah ditetapkan	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1) Jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	1 laporan		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1) Jumlah laporan hasil monev kebijakan pemerintahan dan otda yang disusun	1 laporan
		2) Jumlah Laporan capaian SPM yang memenuhi target	1 laporan			2) Jumlah Laporan capaian SPM yang memenuhi target	1 laporan
		4) Persentase elemen data IKK LPPD yang tercukupi	100%			3) Persentase elemen data IKK LPPD yang tercukupi	100%
		4) Jumlah laporan Pemberhentian dan PAW DPRD	1 laporan			4) Jumlah laporan Pemberhentian dan PAW DPRD	1 laporan
		5) Jumlah Laporan kepegawaian KDH dan WKDH	1 laporan			5) Jumlah Laporan kepegawaian KDH dan WKDH	1 laporan
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1) Persentase lembaga keagamaan yang aktif	100%		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1) Persentase lembaga keagamaan yang aktif	100%
		2) persentase peserta hasil binaan seleksi MTQ yang berprestasi.	100%			2) persentase peserta hasil binaan seleksi MTQ yang berprestasi.	100%

	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1) Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang disusun	4 Kebijakan		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1) Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang disusun	4 Kebijakan
		2) Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%			2) Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%
	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1) Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang agama dan kemasyarakatan yang disusun	4 Kebijakan		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1) Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang agama dan kemasyarakatan yang disusun	4 Kebijakan
		2) Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%			2) Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%
	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1) Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1) Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%
		2) Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan	100%			2) Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan	100%

		3) Prosentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%			3) Prosentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1) Jumlah penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	5 Perda			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1) Jumlah penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi
		2) Jumlah penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	30 Perbup				2) Jumlah penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi
		3) Jumlah penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	450 SK				3) Jumlah penetapan keputusan bupati yang difasilitasi
		4) Persentase butir-butir pandangan umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif.	100%				4) Persentase butir-butir pandangan umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif.
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1) Persentase permintaan bantuan hukum terkait permasalahan hukum daerah yang difasilitasi	100%			Fasilitasi Bantuan Hukum	1) Persentase permintaan bantuan hukum terkait permasalahan hukum daerah yang difasilitasi
		2) Persentase permasalahan hukum daerah yang difasilitasi penyelesaiannya	100%				2) Persentase permasalahan hukum daerah yang difasilitasi penyelesaiannya
		3) Persentase perangkat daerah dan desa yang telah diberi penyuluhan hukum	100%				3) Persentase perangkat daerah dan desa yang telah diberi penyuluhan hukum

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1) Jumlah hasil kajian produk hukum yang ditindaklanjuti penyempurnaannya	5 Produk Hukum		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1) Jumlah hasil kajian produk hukum yang ditindaklanjuti penyempurnaannya	5 Produk Hukum
		2) Jumlah produk hukum yang didokumentasikan (manual dan elektronik)	500 produk hukum			2) Jumlah produk hukum yang didokumentasikan (manual dan elektronik)	500 produk hukum
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100%		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100%		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100%		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	100%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase pelaksanaan kerjasama yang dimonev	100%		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase pelaksanaan kerjasama yang dimonev	100%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1) Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	100%		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1) Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	100%
		2) Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%			2) Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%

		3) Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System)	100%			3) Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System)	100%	
		4) Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	100%			4) Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	100%	
		5) Level Kematangan Organisasi PBJ	LEVEL 4			5) Level Kematangan Organisasi PBJ	LEVEL 4	
		<i>Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan</i>	<i>100%</i>		<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan</i>	<i>100%</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1) Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang disusun	3 dokumen		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang Pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun	2 dokumen	
		2) Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang ditindaklanjuti.	80%			Jumlah monev bidang BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	4 laporan	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1) Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan	80%		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kehadiran peserta pada sosialisasi	90%	

		perdagangan yang ditindaklanjuti					
		2) Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	5 merk			Persentase masyarakat yang mengetahui ketentuan di bidang cukai	90%
		3) Jumlah jenis media publikasi ketentuan terkait cukai yang digunakan	3 jenis			Jumlah media yang mempublikasikan ketentuan di bidang cukai dan/atau menginformasikan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	20 media
						Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang disusun	2 dokumen		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase Penyusunan Profil Makro Ekonomi	100%
						Jumlah laporan TPID yang disusun	4 laporan
						Jumlah monev bidang perekonomian yang dilaksanakan	4 laporan

	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	<i>Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan dan pertanian serta perikanan yang disusun</i>	<i>3 laporan</i>		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>1. Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan dan pertanian serta perikanan yang disusun 2. Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, energi dan air yang disusun</i>	<i>3 laporan</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang disusun	1 laporan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang disusun	1 laporan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	1 laporan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	1 laporan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang Energi dan Air yang disusun	1 laporan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang Energi dan Air yang disusun	1 laporan
	Administrasi Pembangunan	1) Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ dan Laporan Berkala) Yang Sesuai	8 Dokumen		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1) Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ dan Laporan Berkala) Yang	100%

		<i>Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu</i>			<i>Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu</i>	
		2) Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	87%		<i>Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target</i>	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun	3 Kebijakan		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun 1 Kebijakan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi = 90 %	100%		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi = 90 % 100%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dok pelaporan kinerja daerah yang disusun	8 Dokumen		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dok pelaporan kinerja daerah yang disusun 5 Dokumen
	<i>Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Level Kematangan Organisasi PBJ</i>	<i>Level 4 pada 1 Indikator</i>		<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Level Kematangan Organisasi PBJ</i> <i>Level 4 pada 1 Indikator</i>
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkiraan RUP	85%		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkiraan RUP 90%
		Persentase penawaran penyedia yang memenuhi	75%			Persentase penawaran penyedia yang 80%

			persyaratan dokumen pengadaan				memenuhi persyaratan dokumen pengadaan	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	80%		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	80%
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase permasalahan yang di advokasi	100%		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase permasalahan yang di advokasi	100%
			Persentase OPD dengan pemaketan PBJ yang sesuai	95%			Persentase OPD dengan pemaketan PBJ yang sesuai	95%

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase implementasi produk hukum daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase implementasi kebijakan daerah;							
	a. Bidang Pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Bidang Perekonomian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Bidang Kesra	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Bidang PBJ	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Bidang Organisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	f. Bidang Pemerintahan							
3	Persentase IKU OPD yang mencapai target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	-	-	-	75	75	75	75
6	Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	-	-	-	75	75	75	75

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk Rencana Strategis (*RENSTRA*) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo akan tercapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Demikian semoga Rencana Strategis (*RENSTRA*) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.



Sekretariat daerah
Kabupaten Sidoarjo